



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

RENCANA KERJA Tahun 2023

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



JALAN : DR. SAM RATULANGI NO. 1010 PALU, Kode Pos 94111, TELP. 421411 - 421812 Fax. (0451) 423612 - 421411

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat terselesaikan tepat waktu.

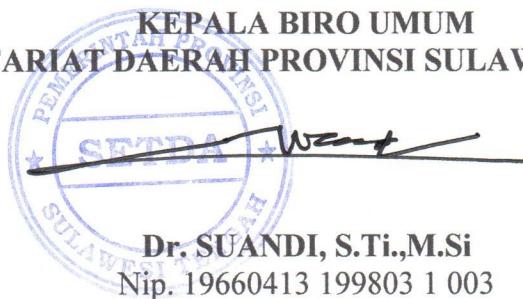
Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan dokumen tahunan sebagai langkah atau tindak lanjut dari Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang berpedoman pada Renstra. Hal ini untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam ranwal renja dengan renstra perangkat daerah.

Sangat disadari sepenuhnya bahwa rencana kerja ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya dan pengabdian kita untuk bergerak cepat menuju Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju. Amin.

Palu,

2022

**KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penyusunan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Tahun Lalu	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	15
2.5. Penelaahan Usulan Program	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	22
3.3. Rencana Kerja Perangkat Daerah	22
3.4. Pendanaan	24
BAB V PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk memiliki dokumen perencanaan secara menyeluruh yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diwajibkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan dokumen tahunan sebagai langkah atau tindak lanjut dari Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026. Disamping itu, Rencana Kerja ini juga diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja berdasarkan kemampuan serta kondisi lingkungan sebagai kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023.

Program dan kegiatan yang direncanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui pembiayaan APBD Provinsi Tahun 2023 disusun berdasarkan suatu sistem yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*Outcome*) dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan berdasarkan pendekatan kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan pedoman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) .
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tengan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.
17. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Biro Umum pada optimalisasi pencapaian hasil (*Outcomes*).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi.
3. Mengoptimalkan mutu modal manusia melalui peningkatan sarana dan prasarana.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan capaian RENSTRA Tahun lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Tahun Lalu

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen rencana perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dimaksud meliputi:

1. Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan, dan
3. Hasil dari Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; diwajibkan bagi setiap daerah untuk membuat dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sedangkan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun atau membuat dokumen rencana strategis (renstra) setiap 5 tahun dan dokumen rencana kerja (renja) setiap tahun.

Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan penegasan sekaligus pedoman teknis penyusunan seluruh dokumen yang disebutkan di atas.

Jumlah alokasi dana tahun anggaran 2022 untuk Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari Dana APBD sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 75.894.200.927,00** yang terdiri dari:

1. Dana Belanja Operasi	Rp 67.670.412.177,00
- Belanja Pegawai	Rp 51.250.851.420,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.419.560.757,00
2. Dana Belanja Modal	Rp 8.223.788.750,00
- Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Rp 7.683.788.750,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 540.000.000,00
3. Total (1 + 2)	Rp 75.894.200.927,00

(Terbilang: Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

Pada bulan Juni pagu mengalami perubahan anggaran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Alokasi anggaran pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berubah menjadi **Rp78.594.085.047,00** dengan perincian sebagai berikut:

1. Dana Belanja Operasi	Rp 70.370.296.297,00
- Belanja Pegawai	Rp 53.950.735.540,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.419.560.757,00
2. Dana Belanja Modal	Rp 8.223.788.750,00
- Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Rp 7.683.788.750,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 540.000.000,00
3. Total (1 + 2)	Rp 78.594.085.047,00

(Terbilang : Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Untuk lebih jelas anggaran Biro Umum Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	KODE					NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	1	2	3	4	5		
	04	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	78.594.085.047,00
	04	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.509.225,00
	04	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.509.225,00
	04	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.998.375.490,00
	04	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.619.795.540,00
	04	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.250.956.000,00
	04	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.098.950,00
	04	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.750.000,00
	04	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	29.250.000,00
	04	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20.025.000,00
	04	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.500.000,00
	04	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	871.317.850,00
	04	01	01	1.03	02	Pengamanan BMD SKPD	190.000.000,00
	04	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	12.000.000,00
	04	01	01	1.03	06	Penatausahaan BMD pada SKPD	123.520.000,00
	04	01	01	1.03	07	Pemanfaatan BMD pada SKPD	545.797.850,00

	04	01	01	1.05		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	13.000.000,00
	04	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	13.000.000,00
	04	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.994.779.100,00
	04	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	221.401.500,00
	04	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	532.411.600,00
	04	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	574.210.000,00
	04	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.450.000,00
	04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	700.000.000,00
	04	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	894.256.000,00
	04	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.050.000,00
	04	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.933.263.750,00
	04	01	01	1.07	05	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.769.250.000,00
	04	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebeleur	678.342.500,00
	04	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	485.671.250,00
	04	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.860.804.650,00
	04	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.219.925,00
	04	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2.390.949.950,00
	04	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351.135.000,00
	04	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.499.775,00
	04	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.840.034.982,00
	04	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	986.900.000,00
	04	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	689.970.000,00
	04	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	104.450.000,00
	04	01	01	1.09	06	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	826.105.000,00
	04	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.411.470.750,00
	04	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.536.870,00
	04	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.320.602.362,00
	04	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	29.999.475,00
	04	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan RT Kepala Daerah	11.000.000,00
	04	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan RT Wakil Kepala Daerah	11.000.000,00
	04	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan RT Sekretariat Daerah	11.000.000,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Umum mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
4. Penyiapan pelaksanaan supervisim pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
5. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinamika organisasi pemerintahan dewasa ini menuntut perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sasaran-sasaran, strategi, kebijakan, progam dan kegiatan sehingga Biro Umum dapat lebih akomodatif terhadap perubahan dan dinamika daerah yang terjadi di tahun berikutnya. Dengan upaya pengembangan dan peningkatan yang dilakukan secara bertahap diharapkan sasaran-sasaran kinerja Biro Umum dapat bermanfaat bagi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu dapat dikemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran dan pengurangan anggaran.
2. Pekerjaan fisik membutuhkan waktu pekerjaan yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pekerjaan.
3. Pekerjaan fisik sebagai pekerjaan pembangunan bangunan dan gedung membutuhkan dana yang besar sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui proses administrasi lelang/tender yang memerlukan waktu yang lama dan

dokumen yang lengkap. Sehingga proses tender/lelang waktu berpengaruh terhadap waktu pekerjaan fisik.

4. Kelebihan personal dibandingkan dengan volume tugas yang ada.
5. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki personality yang dibutuhkan dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang tugas kerumahtanggaan.
6. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.
7. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi dan kemampuan pengadaan barang dan jasa.
8. Keterlambatan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
9. Keterlambatan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang/Jasa dikarenakan lemahnya pemahaman aparatur pengelola Kegiatan dalam memahami proses pengadaan barang/jasa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 berjumlah 1 Program, 9 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022. Adapun hasil kajian dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu:
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD.
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pengadaan Meubel.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- Pemeliharaan Meubel.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu:
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah “*Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*“.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, perlu diimplementasikan melalui tujuh misi Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam 5 agenda prioritas nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia.
2. Pembangunan Infrastruktur.
3. Penyederhanaan Segala Bentuk Kendala Regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.

Dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA). Keppres tersebut intinya mengatur pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD, yang tugasnya antara lain memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Dengan tujuan demikian, TEPRA tidak hanya ‘beroperasi’ di lingkungan Pemerintah Pusat, namun TEPRA akan juga dibentuk di Pemerintahan Daerah sebagai perwakilan TEPRA di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat sesuai dengan salah satu cita-cita dalam nawa cita bahwa Negara hadir dalam kehidupan warga negaranya.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan perencanaan strategis yang sangat penting dalam perjalanan suatu organisasi, kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru suatu otonomi daerah, oleh karena itu suatu organisasi harus mampu mengakomodir dinamika tersebut.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 9 biro yang merupakan sub unit organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha. Fungsi Biro Umum, adalah:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- d. Penyiapan pelaksanaan supervisim pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
- e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk itu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kewenangan dalam upaya pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset seta tata usaha. Agar pengelolaan bidang kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset seta tata usaha terlaksana dapat mendukung pembangunan daerah sebagai bentuk pelayanan prima bagi masyarakat maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut agar mampu meningkatkan kemampuan untuk memberikan pelayanan prima. Hal ini menjadi tuntutan dari perkembangan global dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sebagai konsekuensi logis, maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut kinerjanya dalam menyerap, menerjemahkan dan mengarahkan potensi dan memperbaiki kinerja sehingga memberikan pelayanan prima sebagai bagian dari sumbangsih bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan pembangunan daerah.

Menyikapi adanya perkembangan dan tuntutan masyarakat maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga yang dapat “dipercaya” kemampuannya dalam menerjemahkan cita-cita masyarakat untuk mengaktualisasikan maupun mengoptimalkan potensi daerah secara berkesinambungan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada unit satuan kerja dan masyarakat khususnya dalam mewujudkan “*Good Governance*”, maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Biro-Biro yang lain berupaya mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu “***Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju***”.

Di dalam proses mewujudkan visi tersebut, maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengemban misi yaitu:

Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum, dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia (HAM).

Biro Umum mempunyai Tujuan yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)”

Sasaran Biro Umum:

- a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi.
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Meningkatkan pelayanan kerumah tanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta tata usaha sekretariat.

- d. Meningkatkan layanan kedinasan dan urusan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja

Dalam pelaksanaan pembangunan Biro Umum melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang terakomodir dalam Rencana Kerja. Biro Umum mengemban 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan; serta 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Umum:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan Yaitu:
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan.
 - Pengadaan Meubel.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Meubel.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

4.2 Pendanaan

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Periode / Tahun : 2023
Prakiraan Maju : 2024

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat	Kabupaten/Kota	64 Indeks	70.964.343.389,00	APBD		64 Indeks	77.447.101.290,90
01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah	Kabupaten/Kota	100%	29.092.900,00	APBD		100%	32.002.190,00
01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota	8 Dokumen	29.092.900,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	8 Dokumen	32.002.190,00
01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi, Pelayanan Umum dan pelaporan keuangan perangkat daerah	Kabupaten/Kota	100%	58.429.047.257,00	APBD		100%	64.271.951.982,70

1	2	3	4	5	Kabupaten/Kota	7	8	9	10	
01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Setdaprov. Sulteng	Kabupaten/Kota	1 Tahun	54.390.268.457,00	APBD	SUBBAG. KEU & VERIFIKASI	
01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa ASN pendukung pelaksanaan kegiatan	Kabupaten/Kota	1 Tahun	3.891.156.000,00	APBD	SUBBAG. KEU & VERIFIKASI	
01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten/Kota	2 Dokumen	72.098.700,00	APBD	SUBBAG. KEU & VERIFIKASI	
01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten/Kota	2 Dokumen	14.749.450,00	APBD	SUBBAG. AKUNTANSI	
01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten/Kota	2 Laporan	29.249.950,00	APBD	SUBBAG. AKUNTANSI	
01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten/Kota	14 Laporan	20.024.850,00	APBD	SUBBAG. KEU & VERIFIKASI	
01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.499.850,00	APBD	SUBBAG. KEU & VERIFIKASI	
01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase penyediaan asuransi BMD, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kabupaten/Kota	100%	775.519.050,00	APBD	100%	
01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten/Kota	2 Dokumen	190.000.000,00	APBD	SUBBAG. PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET	
1		2	3	4	5	Kabupaten/Kota	7	8	9	10

01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota	2 Laporan	11.999.500,00	APBD	SUBBAG. AKUNTANSI	2 Laporan	13.199.450,00
01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota	1 Laporan	353.519.550,00	APBD	SUBBAG. AKUNTANSI	1 Laporan	388.871.505,00
01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik DaerahD pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten/Kota	2 Dokumen	220.000.000,00	APBD	SUBBAG. PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET	2 Dokumen	242.000.000,00
01	1.05		Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaiian perangkat daerah	Kabupaten/Kota	100%	13.000.000,00	APBD		100%	14.300.000,00
01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Kabupaten/Kota	100 Orang	13.000.000,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	100 Orang	14.300.000,00
01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum	Kabupaten/Kota	100%	1.630.258.786,00	APBD		100%	1.793.284.664,60
01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten/Kota	1 Paket	57.836.536,00	APBD	SUBBAG. PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET	1 Paket	63620189,60
01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten/Kota	3 Paket	332.411.800,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	3 Paket	365652980,00
1	2	3	4	5	Kabupaten/Kota	7	8	9	10		

01	1.03	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten/Kota	2 Paket	243.194.350,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	2 Paket	267513785,10
01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten/Kota	1 Paket	80.759.750,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	1 Paket	88.835.725,00
01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten/Kota	2 Laporan	699.995.000,00	APBD	SUBBAG. UR. DALAM	2 Laporan	769.994.500,00
01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/Kota	2 Laporan	142.790.250,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	2 Laporan	157.069.275,00
01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten/Kota	4 Dokumen	73.271.100,00	APBD	SUBBAG. PERSURATAN	4 Dokumen	80.598.210,00
01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur	Kabupaten/Kota	100%	1.694.662.882,00	APBD		100%	1.250.452.733,20
01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kabupaten/Kota	6 Unit	557.887.670,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	3 Paket	613.676.437,00
01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten/Kota	3 Paket	821.118.896,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	3 Paket	903.230.785,60

01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten/Kota	60 Unit	315.656.316,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	40 Unit	347.221.947,60
		1	2	3	4	5	Kabupaten/Kota	7	8	9	10
01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten/Kota	100%	2.136.336.950,00	APBD		100%	2.349.970.645,00
01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten/Kota	2 Laporan	59.455.800,00	APBD	SUBBAG. PERSURATAN	2 Laporan	65.401.380,00
01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten/Kota	4 Laporan	1.802.248.000,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	4 Laporan	1.982.472.800,00
01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten/Kota	2 Laporan	201.133.600,00	APBD	SUBBAG. UR. DALAM	2 Laporan	22.1246.960,00
01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten/Kota	3 Laporan	73.499.550,00	APBD	SUBBAG. TUP DAN STAF AHLI	3 Laporan	80.849.505,00
01	1.09		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kabupaten/Kota	100%	5.007.093.230,00	APBD		100%	5.507.802.553,00

01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten/Kota	10 Unit	986.900.000,00	APBD	SUBBAG. PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS	10 Unit	1.085.590.000,00
		1	2	3	4	5	Kabupaten/Kota	7	8	9	10
01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten/Kota	100 Unit	800.060.000,00	APBD	SUBBAG. PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS	100 Unit	880.066.000,00
01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten/Kota	30 Unit	104.500.000,00	APBD	SUBBAG. PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET	30 Unit	114.950.000,00
01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten/Kota	170 Unit	362.100.000,00	APBD	SUBBAG. PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET	170 Unit	398.310.000,00
01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten/Kota	5 Unit	1.012.260.000,00	APBD	SUBBAG. PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET	5 Unit	1.113.486.000,00
01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten/Kota	5 Unit	670.000.000,00	APBD	SUBBAG. PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET	5 Unit	737.000.000,00

01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten/Kota	5 Unit	1.071.273.230,00	APBD	SUBBAG. PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET	5 Unit	1.178.400.553,00
1			2	3	4	5	Kabupaten/Kota	7	8	9	10
01	1.12		Fasilitasi Keruماhtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan fasilitas dan jasa layanan keruماhtanggaan KDH, WKDH dan TUP	Kabupaten/Kota	100%	1.249.332.334,00	APBD		100%	1.374.265.567,40
01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten/Kota	2 Paket	710.113.320,00	APBD	SUBBAG. UR. RT GUBERNUR	2 Paket	781.124.652,00
01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten/Kota	2 Paket	330.122.990,00	APBD	SUBBAG. UR. RT WAGUB	2 Paket	363.135.289,00
01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kabupaten/Kota	2 Paket	209.096.024,00	APBD	SUBBAG. UR. DALAM	2 Paket	230.005.626,40
Jumlah							70.964.343.389,00				77.447.101.290,90

BAB V **PENUTUP**

Rencana Kerja Biro Umum Tahun 2023 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia beserta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Adapun kondisi dan situasi yang berpengaruh pada sasaran strategis adalah:

1. Peranan Biro Umum dalam pemberian dukungan layanan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan, pengelolaan keuangan sekretariat daerah, pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana kerja, serta kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bentuk peranan Biro Umum yang mencakup ketatausahaan, administrasi keuangan dan aset, penyediaan sarana/prasarana kerja serta kerumahtanggaan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Capaian kinerja belum mencapai target maksimal target yang ditetapkan dalam pengukuran tingkat capaian sasaran strategis disebabkan adanya kendala umum sebagai berikut:

1. Lemahnya kualitas sumber daya manusia yang menjadi pelaksana utama program dan kegiatan. Hal ini disebabkan pencapaian program peningkatan kualitas sumber daya manusia (*capacity building*) setiap tahunnya belum sebanding dengan jumlah aparatur yang ada. Jumlah anggaran yang terbatas menyebabkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur setiap tahun masih minim sehingga tidak dapat memenuhi dinamika perkembangan kebutuhan organisasi.
2. Meskipun Biro Umum telah memiliki standar operasional prosedur namun belum teruji penerapannya, sehingga berpengaruh terhadap standar pemberian layanan kepada unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.
3. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi belum dapat mengimbangi perkembangan kebutuhan layanan publik.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dengan menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan kualitas (*capacity building*) dan kuantitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
2. Menyusun, menguji dan melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

3. Menyusun, menguji dan melaksanakan standar operasional prosedur yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
4. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara bertahap sesuai kemampuan dan standar daerah.
5. Mendorong daya kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan kondisi yang realistik dari perencanaan kegiatan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 tergantung pada sikap, mental, tekad serta semangat dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitannya maka diharapkan seluruh aparatur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan Rencana Kerja Anggaran di setiap biro sebagai dokumen yang mengacu pada Renja Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2021-2026 sehingga pelaksanaan rencana berjalan secara sistematis dan sinergis.

Demikian Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini diajukan untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.



PROVINSI SULAWESI TENGAH

DOKUMEN RENJA

RENCANA KERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



Disusun Oleh :

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun dan merupakan penjabaran Renstra. Adapun Penyusunan Renja merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan.

Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih mengharap saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, kami berharap dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Palu, Januari 2023

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN

OTONOMI DAERAH



Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 198803 1 017

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan capaian RENSTRA Tahun lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah adalah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, yang berpedoman kepada Renstra OPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Renja 2023 dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi pada Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro pada tahun-tahun sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap pencapaian Renstra Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan.

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana

Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 juga berpedoman pada Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana pada tahun 2021 terjadi perubahan Nomenklatur Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun

2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah.

Selanjutnya mengingat Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan komitmen bersama yang terencana dan sistematis dalam meningkatkan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya, Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 berdasarkan pada:

- A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- E. Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;
- F. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- G. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021.

H. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di susun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah serta membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2023 untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapainya sasaran pembangunan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan sebagai berikut

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomidaerah dan kerja sama;
- d. penyiapan supervisi, fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.4 Sistematika Penulis

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan capaian RENSTRA Tahun lalu
- 2.5 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.4. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.5. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.6. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan di Tahun 2020

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terbentuk melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Untuk Tahun 2020, Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengusulkan 2 Program dengan 8 Kegiatan 17 Sub Kegiatan didalamnya. Faktor-kator yang mempengaruhi pelaksanaan/pencapaian target kinerja program/kegiatan antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah maupun anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal. Namun, dengan komitmen yang tinggi dari tiap-tiap jajaran baik fungsional maupun struktural, seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada dapat terlaksana dengan baik. Dari faktor-faktor di atas telah diantisipasi dengan pengusulan tambahan sumber daya manusia melalui penyusunan Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja serta rasionalisasi anggaran masing-masing kegiatan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA di Tahun 2020 dengan Nama Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2021 berubah Nomenklatur menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diliat pada tabel halaman berikutnya. Adapun Penggunaan Anggaran Tahun 2022 dan 2023 Program dan Kgiatan adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1.1

**PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ADMINISTRASI WILAYAH DAERAH DAN
PEMERINTAHAN TAHUN 2020**

NO	Program/Kegiatan	SASARAN TARGET		PAGU 2020
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran	60%	478.006.402
1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	8 Kabupaten dan Daerah Lainnya	1 Laporan	310.133.430
2	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kota Palu	1 Laporan	167.872.972
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	738.721.592
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu	25 Unit	738.721.592
III	Program Fasilitasi Administrasi Pengembangan Kawasan	Meningkatnya pengelolaan administrasi pengembangan kawasan	1 Dokumen	83.525.100
4	Inventarisasi Pengembangan Kawasan	6 Kabupaten dan Daerah Lainnya	1 Dokumen	83.525.100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	1 Orang	0

5	Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Daerah Lainnya	1 Orang	0
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3 Dokumen	16.455.000
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	100%	16.455.000
VI	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	4 Dokumen	58.032.230
7	Koordinasi Perencanaan Program	Kota Palu dan Daerah Lainnya	100%	58.032.230
VII	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	laporan rapat kerja gubernur dengan bupati/walikota dan camat	1 Dokumen	0
8	Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat	Kota Palu dan Daerah Lainnya	1 Dokumen	0
VIII	Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Kewilayahan	Meningkatnya penataan administrasi kewilayahannya	3 Dokumen	226.215.399
9	Pembinaan dan Penamaan Toponimi	5 Kabupaten dan Daerah Lainnya	1 Dokumen	88.897.933
10	Penataan Administrasi Batas Daerah	4 Kabupaten dan Daerah Lainnya	1 Laporan	90.407.333

11	Inventarisasi Data dan Kode Wilayah	7 Kabupaten dan Daerah Lainnya	1 Dokumen	46.910.133
IX	Program Pembinaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama	Meningkatnya penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pemerintahan serta administrasi kerjasama	3 Dokumen	233.778.725
12	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan	Tersebar di 6 Kabupaten (DAU)	1 Dokumen	67.091.475
13	Koordinasi dan Penyelenggaraan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	Tersebar di 13 Kabupaten (DAU)	1 Dokumen	83.294.850
14	Pembinaan Administrasi Kerjasama Pemerintah Provinsi	Tersebar di 10 Kabupaten (DAU)	1 Dokumen	83.392.400
X	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	laporan EKK dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	2 Dokumen	177.102.464
15	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	12 Kabupaten dan Daerah Lainnya	2 Dokumen	177.102.464
Total Anggaran				2.011.836.912

Setelah perubahan Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan, Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Bertujuan Untuk pertajam tugas dan fungsi, Maka Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Biro Administrasi Wilayah bergabung dengan Biro Otonomi Daerah menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021

Tabel .2.1.2**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN****PERANGKAT DAERAH: BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROV.SULTENG**

NO	Program/Kegiatan	RENCANA PAGU 2021		
		INDIKATOR	TARGET KINERJA	USULAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	1.380.350.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya laporan capaian kinerja dan ihtisar, realisasi kinerja SKPD serta penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3 Dokumen	350.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Program/Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	200.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar, realisasi SKPD	1 Dokumen	50.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	30.350.000

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	1 Dokumen	30.350.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	350.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Dokumen	50.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	1 Dokumen	300.000.000
4	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	200.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	1 Dokumen	100.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor dan makanan/minuman	2 Dokumen	100.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	450.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	1 Dokumen	450.000.000
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100%	1.779.502.000
6	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	282.375.500
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan umum	1 Dokumen	141.187.750
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Terselenggaranya pengelola administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah	1 Dokumen	141.187.750
7	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	423.563.250
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terselenggaranya fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD	1 Dokumen	141.187.750

	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terselenggaranya pengembangan otonomi dan penataan Urusan	1 Dokumen	141.187.750
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	1 Dokumen	141.187.750
8	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	1.073.563.250
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Terselenggaranya fasilitasi kerjasama antar pemerintah	1 Dokumen	141.187.750
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Terselenggaranya fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta	1 Dokumen	141.187.750
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan kerja sama	1 Dokumen	791.187.750
TOTAL				3.159.852.000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai unit kerja yang baru terbentuk pada Tahun 2020, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah baru menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada tahun berjalan melalui Rencana Strategis Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021 Dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 mencapai 98%. Dan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

Anggaran 2022 mempunyai pagu Rp.3.209.200.000, maka pada Pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 dilakukan terhadap capaian kinerja organisasi dengan menganalisis pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran startegis dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja organisasi dapat dilihat dari analisa pada tiap-tiap sasaran strategis.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan RENJA ini tidak terlepas dari dokumen RKPD yang telah diusulkan sebelumnya, Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan RENJA ini seluruhnya telah sesuai serta mengikuti program/kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD sebelumnya. Semua kebutuhan untuk pelaksanaan RENJA 2023 telah ditampung semuanya dalam RKPD, Oleh karena itu, tidak dijelaskan lebih dalam mengenai perubahan rancangan program dan kegiatan baik penambahan maupun penghapusan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.1.1 dan 2.1.2 berikut

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, "mind set and culture" masih belum terlaksana dengan baik.
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam ukuran waktu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- 2) Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Umum.
- 3) Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah.
- 4) Mewujudkan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- 5) Mewujudkan Fasilitasi Administrasi kepala Daerah dan DPRD.
- 6) Mewujudkan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan.
- 7) Mewujudkan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- 8) Mewujudkan Fasilitasi Kerja sama Antar Pemerintah.
- 9) Mewujudkan Fasilitasi Kerja sama Badan Usaha/Swasta.
- 10) Mewujudkan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Darah.
- 2) Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan Umum.

- 3) Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah.
- 4) Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- 5) Meningkatnya Fasilitasi Administrasi kepala Daerah dan DPRD.
- 6) Meningkatnya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan.
- 7) Meningkatnya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- 8) Meningkatnya Fasilitasi Kerja sama Antar Pemerintah.
- 9) Meningkatnya Fasilitasi Kerja sama Badan Usaha/Swasta.
- 10) Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

3.3 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Sekretariat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Rencana Sekretariat Daerah dan program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh OPD kedalam rencana

kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan 2 Program, 8 Kegiatan, dan 17 Sub Kegiatan.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

6. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah

7. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
- Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

8. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN TARGET ANGGARAN TAHUN 2023**

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN BIRO		
		INDIKATOR	2022	2023
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	NILAI SAKIP	1.519.200.000	1.651.159.638
		INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.188.400	82.221.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.188.400	51.071.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	14.150.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	17.000.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	69.761.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peranturan Perundang-Undangan	20.000.000	69.761.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.072.000	487.389.388
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64.939.600	174.618.585
	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40.000.000	14.916.803

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.072.000	297.854.000
4	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.739.600	835.990.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	623.800.000	835.990.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.200.000	245.558.750
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	330.200.000	245.558.750
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.690.000.000	2.069.079.362
6	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Presentase pelaksanaan tugas pemerintahan	260.000.000	251.562.466
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	130.000.000	108.562.466
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	130.000.000	143.000.000
7	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	553.950.000	319.855.408
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	130.000.000	111.452.071
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	130.000.000	104.631.266

	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	293.950.000	103.772.071
8	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	876.050.000	1.497.661.488
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	130.000.000	1.265.131.266
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	130.000.000	112.632.450
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	616.050.000	119.897.772
TOTAL			3.209.200.000	3.720.239.000

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 adalah turunan dari Rencana Strategis dan sudah mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Rencana Kerja dan pendanaan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 tertuang pada tebel 4.1.1 berikut ini

BAB IV PENUTUPAN

Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada dan memperhatikan sinergitas antar dengan Organisasi Perangkat Daerah lain. Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistematik menjunjung tinggi produktivitas, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Demikian Penyusunan Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2023 semoga memberikan manfaat dan masukan yang dapat meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat memberikan dampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.

Palu, Januari 2023
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

M. SALEH M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 198803 1 017



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

RENCANA KERJA TAHUN 2023

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



2023

BerAKHLAK bangga
melayani bangsa



BerAKHLAK  bangga
#melayani
bangsa

2023

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2021-2024 Administrasi Pembangunan sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Administrasi Pembangunan ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Stratgeis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2021-2026 Biro Administrasi Pembangunan. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Biro Administrasi Pembangunan.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023 menentukan target yang realistik. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287)
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

- 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2013
- 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2023 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2023 ini Biro Administrasi Pembangunan akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber – sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Biro Administrasi Pembangunan dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, memuat Program program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Memuat Latar belakang , Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD, Analisa kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review tehadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan.

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja OPD beserta anggaran sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Biro Administrasi Pembangunan.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Administrasi Pembangunan Tahun **2021** dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023, serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2021 sehingga dapat teridentifikasi, Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada umumnya realisasi program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan.

Khusus untuk Biro Administrasi Pembangunan sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Biro Administrasi Pembangunan menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan serta Noma dan standar pelayanan Biro Administrasi Pembangunan lainnya yang berkaitan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda. Prov. Sulteng

Optimalisasi Fungsi Fasilitasi Dan Koordinasi Biro Administrasi Pembangunan yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas khususnya kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta fungsi Sekretariat Daerah merupakan pusat pengendalian pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Selain memberikan pelayanan kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnya juga memberikan pelayanan kepada pemerintah kabupaten/kota berupa fasilitasi administrasi dibidang produk hukum, organisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan termasuk didalamnya kerjasama pembangunan daerah.

Oleh karena tugas pokoknya menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kedinasan serta kegiatan – kegiatan KDH/WKDH kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, maka seyogyanya melakukan sinkronisasi koordinasi, berintegrasi dan bersinergi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima, dalam arti pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada Masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, yakni Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, masih terdapat permasalahan – permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terintegrasinya Program/kegiatan Provinisi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Permen 56 tahun 2019 belum seluruhnya Kab/Kota Melaksanakan	Pemahaman terhadap Regulasi masih berbeda beda antara kabupaten/Kota.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulteng Tahun 2023

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulteng

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Administrasi Perkantoran yang baik	100%	873.532.050		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Administrasi Perkantoran yang baik	100%	1.238.172.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	
	Bimbingan Teknis Iplementasi Peraturan Perundang-undangan	Palu	Tingkat Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	100%			Bimbingan Teknis Iplementasi Peraturan Perundang-undangan	Palu	Tingkat Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	255.927.050		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	322.291.500
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Tingkat Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	100%	255.927.050		Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Tingkat Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	100%	322.291.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Palu	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	617.605.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Palu	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	915.880.700

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	100%	617.605.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	100%	915.880.700
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	1.626.476.495		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	2.341.827.759
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD,APBN dan Wilayah)	Palu	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	638.312.350		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD,APBN dan Wilayah)	Palu	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	843.673.150
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Palu	Jumlah Dokumen Pembangunan APBD Provinsi	100%	154.231.000		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Palu	Jumlah Dokumen Pembangunan APBD Provinsi	100%	193.595.800
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Jumlah Dokumen Pembangunan APBN Provinsi	100%	157.824.700		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Palu	Jumlah Dokumen Pembangunan APBN Provinsi	100%	193.820.650
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Jumlah Dokumen Pembangunan Wilayah	100%	326.256.650		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Palu	Jumlah Dokumen Pembangunan Wilayah	100%	456.256.700

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Palu		100%	988.155.145		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Palu		100%	1.498.154.609
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Palu	Analisi Dokumen Pelaksanaan Pembangunan	100%	547.322.900		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Palu	Analisi Dokumen Pelaksanaan Pembangunan	100%	925.785.460
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Palu	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah	100%	182.679.395		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Palu	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah	100%	207.679.560
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah	100%	258.152.850		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah	100%	364.689.589

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng. tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan
3. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Ketatalaksanaan
4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
5. Peningkatan Akuntabilitas
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi
7. Pengendalian Pembangunan
8. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
9. Peningkatan Kualitas Kinerja BUMD
10. Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi

Memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dapat dikemukakan bahwa secara umum keterkaitannya dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari tugas dan fungsi untuk mewujudkan :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pembinaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- c. Perumusan dan penyusunan kebijakan daerah serta pembinaan di bidang perekonomian, pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan;
- d. Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- f. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pembinaan di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- g. Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- i. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Administrasi Pimpinan

Dalam rangka mencapai visi, melaksanakan misi dan memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.
 - b. Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang terlihat dari peningkatan kinerja dan disiplin aparatur.
 - c. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.
 - d. Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah.
 - e. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
 - f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundangan undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi. Sasarannya adalah:
- a. Menurunnya angka kemiskinan.
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
- 3) Meningkatkan dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa serta peningkatan sarana dan prasarana. Sasarannya adalah meningkatnya kerukunan hidup dan harmonisasi umat beragama.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	meningkatnya layanan keprotokolan, materi dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan administrasi kepegawaian	Tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		tingkat kepuasan terhadap materi dan dokumentasi pimpinan	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Persentase kualitas layanan kepegawaian lingkup sekretariat daerah	Persen	100	100	100	100	100
		Tingkat kualitas penyusunan dokumen perencanaan lingkup sekretariat daerah	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan RKPD Biro Administrasi Pembangunan Setda prov. Sulteng Tahun 2023 Telah Tersusun 2 (dua) Program yang terjabarkan dalam 5 (lima) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Biro Administrasi Pembangunan**

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	4	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD, APBN dan Wilayah)	4	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
				5	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
				6	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
		7	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	7	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
				8	Pelaporan Pelaksanaan Pemabngunan
				9	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Dalam kaitanya

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting		
				2021		2022		2023		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase Administrasi Perkantoran yang baik				100 %		100 %	1.238.172.200	100 %	1.238.172.200				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Baik				100 %	24.954.675	100 %		100 %		Palu			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Tingkat Bimbingan Teknis Implementasi Perundang- undangan				100 %	24.954.675	100 %		100 %		Palu			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Baik				100 %	352.800.000	100 %	322.291.500	100 %	322.291.500	Palu			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Pelaksanaan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah				100 %	304.630.450	100 %	322.291.500	100	322.2 91.50 0	322.291.500	Palu		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Baik				100 %	705.072.277	100 %		100 %		Palu			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran				100 %	705.072.277	100 %	915.880.700	100	915.8 80.70 0	915.880.700	Palu		

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting		
				2021		2022		2023		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12		
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				6 Doke men	1.980.897.675	6 Doke men	915.880.700	6 Doke men	2.341.827.759				
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD,APBN dan Wilayah)	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			3		792.741.125	3		843.673.150	3 Dokumen	843.673.150			
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pembangunan APBD Provinsi			1 Dokumen		192.209.500	1 193.595.800	193.595.800	1 Dokumen	193.595.800	Palu			
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pembangunan APBN Provinsi			1 Dokumen		174.274.975	1 193.820.650	193.820.650	1 Dokumen	193.820.650				
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Pembangunan Wilayah			1 Dokumen		426.256.650	1 456.256.700	456.256.700	1 Dokumen	456.256.700				
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				3 Dokumen		1.188.155.550	3 1.498.154.609	1.498.154.609	3 Dokumen	1.498.154.609				
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Analisis Dokumen Pelaksanaan Pembangunan			1 Dokumen		747.322.675	1 Dokumen	925.785.460	1 Dokumen	925.785.460				
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah			1 Dokumen		182.679.775	1 Dokumen	207.679.560	1 Dokumen	207.679.560				

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting		
				2021		2022		2023		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah				1 Doku men	258.153.100	1 Doku men	364.689.589	1 Doku men	364.689.589				

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Periode 2022-2023, dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023.

Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi tengah juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang Pengelolaan informasi dan Pelayanan Pimpinan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

Palu, 2023
Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. ABDUL RAAF MALIK, M.Si

Pembina Tk. I
Nip.19691022 198903 1 006

SULAWESITENGAH



RENJA PERUBAHAN

Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

2023

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	5
2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan sampai Triwulan II Tahun 2023	5
BAB III	9
3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	9
3.1.2 Indikator Kinerja Utama	10
3.2 Rencana Program dan Kegiatan	11
BAB IV PENUTUP	17
KEPALA BIRO HUKUM,	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan di setiap tahun anggaran. Pada tahun 2023 ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi tengah menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan sesuai dengan dengan perkembangan keadaan antara lain meliputi : perubahan indikator pada program kegiatan yang bertujuan agar target kinerja berjenjang dapat terukur atau akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4335);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 829).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Renja Perubahan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan Tahun 2023 yang merujuk pada Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna terwujudnya efektifitas alokasi anggaran dalam pembangunan.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 :

1. Adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum;
2. Rencana penambahan pagu anggaran untuk mendukung pemenuhan sarana dan pra sarana perangkat daerah yang berdampak pada pencapaian target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
- 2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023
- BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
- 3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2023 sampai dengan triwulan kedua, selain itu juga memperhatikan dokumen Resntra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Adapun Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Realisasi Capaian Kinerja

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	
					I		II			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Percentase draft produk hukum menjadi produk hukum daerah provinsi	100 persen	1,685,000,000				0 -		
		Percentase draft produk hukum menjadi produk hukum daerah Kabupaten/Kota	100 persen							
		Percentase masalah kasus/perkara hukum/litigasi yang terselesaikan	100 persen							
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan	4 Laporan	1,015,000,000	1 83.870.000	1 260.515.190	2 344.385.190			
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	255 Kepgub	490,000,000	161 Perda	44.070.000	125 Pergub	97.957.500 1 14	286 142.027.500	
			6 Perda		0		1			
			28 Pergub		4		10			
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	6 Dokumen/ Naskah	170,000,000	1 25.000.000	2 30.627.200	3 55.627.200			
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	35 Ranperda	355,000,000	14 Perkada	14.800.000	22 70	131.930.490 159	36 146.730.490	
			160 Perkada		89		70			
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Laporan	670,000,000	1 29.519.300	1 276.506.100	0 306.025.400			
1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	4 Kasus/ Perkara	470,000,000	1 11.090.000	1 207.168.900	2 218.258.900			
2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	4 Kasus/ Perkara	200,000,000	2 18.429.300	2 69.337.200	4 87.766.500			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		INDEKS REFORMASI BIROKRASI	64 Indeks	1,615,000,000				0 0		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74 Nilai	3,250,000		1.295.000		6.500.000 0	7.795.000	

1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	3,250,000		1.295.000		6.500.000	0	7.795.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Keuangan OPD	100	persen	677,424,000		122.716.000		186.070.000	0	308.786.000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Laporan	677,424,000		122.716.000		186.070.000	0	308.786.000
	Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Indeks	160,000,000		-		-	0	-
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	20,000,000					0	-
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	Orang	50,000,000					0	-
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	90,000,000					0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Laporan	495,000,000		92.824.400		194.312.600	0	287.137.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100,000,000		27.825.000		93.905.200	0	121.730.200
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	45,000,000				28.910.000	0	28.910.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	350,000,000		64.999.400		71.497.400	0	136.496.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	17,026,000		-		-	0	-
5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	17,026,000		-		-	0	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	180,000,000				16.000.000	0	16.000.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	180,000,000				16.000.000	0	16.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Laporan	82,300,000		-		44.988.318	0	44.988.318

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	Unit	62,300,000				31.098.318	0	31.098.318
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	20,000,000				13.890.000	0	13.890.000

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mengembangkan tugas dan tanggungjawab pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang hukum maka sasaran yang diharapkan dalam perumusan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum pada tahun 2023 dapat meningkatkan produktifitas dan pencapaian kinerja sesuai dengan apa yang menjadi target yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktifitas dan kinerja pegawai/aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
2. Biro Hukum dapat mengambil peran strategis dalam penyelenggaran daerah khususnya meningkatkan supermasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia.
3. Biro Hukum mengambil peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara/kasus yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat miskin khususnya.
4. Biro hukum dapat memfasilitasi lintas sektor dan lintas lembaga dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan produk hukum daerah.
5. Meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat dalam hukum.
6. Dapat mendorong produktifitas pemerintah daerah dalam penyelenggaran pembangunan dan dalam melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Mengambil peran dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang dihadapi pemerintah daerah

3.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap perangkat daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis yang selaras dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah serta memenuhi beberapa unsur antara lain :

1. Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama
2. Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
3. Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur
5. Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 untuk rencana kerja perubahan ini disajikan setelah melalui tahapan desk penyesuaian indikator sasaran pada table 4.1 rencana strategis oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	86-88
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64
3	Meningkatnya Pembangunan di Bidang Hukum	Rata – Rata Capaian Target Pembangunan Bidang Hukum di Provinsi Sulawesi Tengah	Persen	80
4	Meningkatnya Capaian RANHAM Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai/Skor Rencana Aksi HAM Provinsi Sulawesi Tengah	Persen	80

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

3.2 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM merupakan program teknis dengan 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan :
 - a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun anggaran Rencana Kerja Perubahan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 seperti yang termuat dalam tabel dibawah ini.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023				PAGU INDIKATIF		Bertambah/Berkurang		
	Capaian Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase draft produk hukum menjadi produk hukum daerah provinsi	100	100							100,000,000	
	Persentase draft produk hukum menjadi produk hukum daerah Kabupaten/Kota	100	100					1,685,000,000	1,785,000,000		
	Persentase masalah kasus/perkara hukum/litigasi yang terselesaikan	100	100								
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan	4	Laporan	4	Laporan	1,015,000,000	1,115,000,000			-	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	255	Kepgub	255	Kepgub						
	Persentase draft produk hukum menjadi produk hukum daerah provinsi	6	Perda	6	Perda	490,000,000	590,000,000				
3	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	28	Pergub	28	Pergub					-	
	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	6	Dokumen/Naskah	6	Dokumen/Naskah	170,000,000	170,000,000				
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk	35	Ranperda	35	Ranperda	355,000,000	355,000,000			-	
	Jumlah Produk Hukum										

Hukum Kabupaten/Kota	hukum menjadi produk hukum daerah	Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	160	Perkada	160	Perkada				
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	Laporan	4	Laporan	670,000,000	670,000,000		
1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase masalah kasus/perkara hukum/litigasi yang terselesaikan	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	4	Kasus/ Perkara	4	Kasus/ Perkara	470,000,000	469,936,000	- 64,000
2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	4	Kasus/ Perkara	4	Kasus/ Perkara	200,000,000	200,064,000	64,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
		INDEKS REFORMASI BIROKRASI	64	64			1,615,000,000	1,902,844,833		287,844,833
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74	Nilai	74	Nilai	3,250,000	9,600,000		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	5	Laporan	3,250,000	9,600,000	6,350,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Keuangan OPD	100	persen	100	persen	677,424,000	742,584,000		65,160,000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Laporan	2	Laporan	677,424,000	742,584,000	65,160,000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Indeks	80	Indeks	160,000,000	150,000,000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	20,000,000	-	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	Orang	35	Orang	50,000,000	-		
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	2	Orang	90,000,000	150,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Laporan	3	Laporan	495,000,000	617,098,833	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,000,000	219,996,483	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	45,000,000	41,160,350
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	3	Laporan	350,000,000	355,942,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	1	Laporan	17,026,000	73,620,000	
5	Pengadaan Mebel	Nilai INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	17,026,000	73,620,000
								56,594,000	

			Jumlah Laporan					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
3		Nilai INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	180,000,000
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Laporan	2	Laporan	180,000,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Laporan	2	Laporan	82,300,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
1		Nilai INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	Unit	25	Unit	62,300,000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	15	Unit	20,000,000
6								92,750,000
								30,450,000
								10,150,000

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan bersama.





RENCANA KERJA PERUBAHAN

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanajatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan, berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2023, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah untuk Tahun 2023.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang positif serta kritik yang konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, bagi kita semua khususnya bagi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 29 April 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	17
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
3.3 Program dan Kegiatan	20
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 2023	25
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	25
4.2 Cascading Biro Perekonomian.....	27
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Biro Perekonomian ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2021-2026 Perekonomian sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Biro Perekonomian dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Biro Perekonomian ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Stratgeis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Perekonomian ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2021-2026 Biro Perekonomian. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Biro Perekonomian.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2023 menentukan target yang realistik. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan rapat evaluasi RKPD tahun 2022 pada tanggal 6 April 2023 serta surat Gubernur Sulawesi Tengah perihal tindaklanjut evaluasi kinerja, RKPD tahun 2022 yaitu semua perangkat daerah menyusun Renja Perubahan dengan rasionalisasi target kinerja berdasarkan hasil desk. Rencana Kerja Perubahan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 digunakan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan selama setahun yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun bersangkutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);**
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);**
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Dokumen Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2023 Biro Perekonomian ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi di atas dalam Rencana Kerja Tahun 2023 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini Biro Perekonomian akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Biro Perekonomian dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Biro Perekonomian Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
- IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAREAH
- V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Perekonomian Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023, serta progres pencapaian kinerja dalam RENSTRA sehingga dapat teridentifikasi, Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan sampai sejauh mana Biro Perekonomian melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan perekonomian daerah diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian
Meningkatnya perumusan dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi kebijakan perekonomian daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Inflasi	1,52%		5,96%	

Tabel diatas menggambarkan bahwa indikator kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, mencapai target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kinerja sangat baik. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari

Desember 2021 hingga Desember 2022 sebesar 5,96 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,80 persen.

Inflasi gabungan dua kota inflasi Sulawesi Tengah pada triwulan II 2022 mengalami peningkatan tekanan, berada diatas level sasaran target inflasi nasional ($3,00 \pm 1\%$ (yoY)). Inflasi tahunan sulawesi tengah pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 5,12% (yoY) meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan I 2022 3,33% (yoY). Secara kumulatif, inflasi tahun berjalan tercatat senilai 3,55% (ytd) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 0,67% (ytd). Secara umum, inflasi sulawesi tengah menunjukkan tren meningkat dalam tiga tahun terakhir, khususnya pada triwulan II 2022 yang mengalami peningkatan tekanan tinggi akibat penyesuaian harga komoditas energi oleh pemerintah karena lebarnya disparitas harga yang bersumber dari eksternal (global). Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus agar perekonomian Sulawesi Tengah yang tinggi dapat tumbuh sejalan dengan kapasitasnya.

Ringkasan Jumlah Anggaran belanja Biro Perekonomian pada Tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 :

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator (Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target capaian program (Renstra) 2023	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.	4.	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan						
4.01	4.01	Sekretariat Daerah						
4.01.01	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	Nilai	758.363.050	1.303.074.936	183.69%	
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				
			Indeks Kepuasan Masyarakat (KKM)	Indeks				
4.01.01.1.06	4.01.01.1.06	Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil administrasi kepegawaiwan perangkat daerah	%	30.261.000	30.261.000	100,00%	
4.01.01.1.05.11	4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah laporan bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan	laporan	30.261.000	30.261.000	100,00%	
4.01.01.1.06	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	laporan	240.342.400	340.114.043	138.07%	
4.01.01.1.06.09	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	240.342.400	340.114.043	138.07%	
4.01.01.1.08	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	paket	48.769.650	1.072.699.833	212,28%	
4.01.01.1.08.03	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	paket	48.759.650	1.072.699.893	212,28%	

	4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Program Perekonomian Daerah	%		1.771.148,950	1.956.877,345	110,49%
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	laporan		493.404,675	710.652,177	144,03%
	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	laporan		250.777,350	425.597,430	169,71%
	4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	laporan		242.627,325	285.054,747	117,49%
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam	dokumen		640.082,025	606.122,718	94,89%
	4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	dokumen		246.927,400	224.027,650	90,73%
	4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	dokumen		245.837,400	225.634,228	91,78%
	4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	dokumen		147.317,225	156.460,840	106,21%
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	laporan		637.662,250	640.102,450	100,38%
	4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aseta Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aseta Usaha	laporan		245.667,450	259.426,280	105,60%
	4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	laporan		246.287,350	229.562,940	93,21%
	4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	laporan		145.707,450	151.113,230	103,71%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Biro Perekonomian dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian yang tertuang dalam Renstra Biro Perekonomian 2022-2026.

Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian dengan Format Tabel 2.2, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	Percentase indikator program Biro Perekonomian yang tercapai			1.062.762.600	758.363.050	872.117.508	1.002.935.134	1.020.458.284	868.067.250	872.117.508	1.002.935.133		
	Jumlah laporan hasil administrasi kepegawaian perangkat daerah			30.261.000	30.261.000	34.800.150	40.020.173	30.261.000	28.246.000	34.800.150	40.020.173		
	Jumlah laporan bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan			30.261.000	30.261.000	34.800.150	40.020.173	30.261.000	28.246.000	34.800.150	40.020.173		
	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah			354.168.575	246.342.400	283.293.760	325.787.824	320.699.459	319.701.350	283.293.760	325.787.824		
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			354.168.575	246.342.400	283.293.760	325.787.824	320.699.459	319.701.350	283.293.760	325.787.824		
	Jumlah penyediaan jasa pembiayaan urusan pemerintah daerah			678.333.025	481.759.650	554.023.598	637.127.137	669.497.825	520.119.900	554.023.598	637.127.136		
	Jumlah Jasa pelaksanaan peralatan dan perlengkapan			678.333.025	481.759.650	554.023.598	637.127.137	669.497.825	520.119.900	554.023.598	637.127.136		

Persentase Capaian Program Perekonomian Daerah		2.189.082.250	1.771.148.950	2.036.821.292	2.342.344.486	1.974.730.192	1.461.532.750	2.036.821.292	2.342.344.487
Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian		698.578.850	493.404.675	667.416.375	652.627.583	624.760.200	466.744.850	667.416.376	652.627.583
Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		306.777.100	250.777.350	288.393.951	331.653.046	294.522.300	239.640.050	288.393.951	331.653.046
Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		391.801.750	242.627.325	279.021.424	320.874.637	330.237.900	227.104.800	279.021.424	320.874.637
Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumberdaya alam		695.948.200	640.082.025	736.094.329	846.508.478	624.981.792	497.046.100	736.094.329	846.508.478
Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		265.913.550	246.927.400	283.966.510	326.561.486	246.588.042	186.150.150	283.966.510	326.561.486
Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		265.661.050	245.837.400	282.713.010	325.119.962	230.741.550	195.878.950	282.713.010	325.119.962
Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		164.373.600	147.317.225	169.414.809	194.827.030	147.652.200	115.016.000	169.414.809	194.827.030
Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD		794.666.200	637.662.260	731.311.688	843.308.326	724.988.200	497.742.800	731.311.688	843.308.326
Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Kelangan dan Aneka Usaha		332.961.900	245.667.450	282.517.568	324.895.203	305.628.700	199.047.000	282.517.568	324.895.203
Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		293.587.000	246.287.350	283.230.453	325.715.020	263.953.600	186.031.900	283.230.453	325.715.020
Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		168.007.300	145.707.450	167.563.567	192.698.103	155.405.900	112.663.900	167.563.567	192.698.103
Jumlah		3.261.845.860	2.629.612.000	2.903.938.800	3.345.279.620	2.996.188.476	2.329.600.000	2.903.938.800	3.345.279.620

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Perekonominan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Biro Perekonominan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonominan dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Biro perekonomian mempunyai fungsi penyiapan pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, maka seyogyanya melakukan sinkronisasi koordinasi, berintegrasi dan bersinergi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima, dalam arti pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Perekonominan masih mendapatkan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kinerja pengelolaan BUMD dan BLUD belum optimal	Belum sepenuhnya memahami standar operasional	Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi Kabupaten/Kota serta OPD terkait dan mitra usaha BUMD untuk peningkatan usaha PDAM, BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha serta BLUD Kabupaten/ Kota
	Belum optimalnya koordinasi BUMD dan BLUD	
Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan belum optimal		Pengawasan pendistribusian BBM dan Gas LPG 3 kg belum optimal
		Pengawasan terhadap harga LPG 3 kg cenderung diatas HET yang ditetapkan pemerintah belum optimal
		Adanya diesparitas harga antara produsen dan konsumen
		Belum Efektif implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), baik di dalam provinsi maupun dengan provinsi lain.
Kurangnya sinergitas kerjasama antar daerah	Belum optimalnya komitmen daerah melakukan kerjasama	Kurangnya dukungan dana untuk program kegiatan kerjasama. Kurangnya SDM yang berkualitas
	Rendahnya daya saing produk daerah	Kurangnya promosi potensi daerah
Kurangnya intensitas komunikasi antar daerah terhadap permasalahan pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah	Banyaknya terjadi permasalahan pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten/Kota	Kurangnya koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan serta mitra sektor dan perangkat daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Program dan kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 berjumlah 2 Program, 6 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya yang berhubungan dengan bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan
3. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Ketatalaksanaan
4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
5. Peningkatan Akuntabilitas
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi
7. Pengendalian Pembangunan
8. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
9. Peningkatan Kualitas Kinerja BUMD
10. Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi

Memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dapat dikemukakan bahwa secara umum keterkaitannya dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari tugas dan fungsi untuk mewujudkan :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pembinaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- c. Perumusan dan penyusunan kebijakan daerah serta pembinaan di bidang
- d. Perumusan dan penyusunan kebijakan daerah serta pembinaan di bidang perekonomian, pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan;
- e. Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang/jasa;
- g. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pembinaan di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- h. Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- j. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mencapai visi, melaksanakan misi dan memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Sasarannya adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.
 - b. Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang terlihat dari peningkatan kinerja dan disiplin aparatur.
 - c. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.
 - d. Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah.
 - e. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
 - f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang- undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi. Sasarannya adalah:
 - a. Menurunnya angka kemiskinan.
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
- 3) Meningkatkan dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa serta peningkatan sarana dan prasarana. Sasarannya adalah meningkatnya kerukunan hidup dan harmonisasi umat beragama.

Tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 disajikan dalam Tabel berikut ini:

	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada			
				Tahun ke:			
2023	2024	2025	2026				
Tercapainya peningkatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan implementasi kebijakan perekonomian, pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa daerah	Meningkatnya perumusan dan koordinasi,fasilitasi,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi kebijakan perekonomian daerah	Persen	100	100	100	100
	Inflasi	Inflasi	Persen	3±1			
		Pengeluaran Perkapita	Juta	10.014.000			

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah intrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program yang ditetapkan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan penggerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam bentuk barang dan jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2023 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 2.399.999.400 dengan rincian :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 887.800.000
- Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp. 1.512.199.400

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Biro Perekonomian

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Parakiraan Maju Tahun 2024		
		Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Sekretariat Daerah						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		<i>Percentase indikator program Biro Perekonomian yang tercapai</i>	100%	887.800.000	100%	1.002.935.133
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan hasil administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	30.500.000	100%	40.020.173
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah laporan bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	30.500.000	1 laporan	40.020.173
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1 laporan	267.200.000	1 laporan	325.787.824
	Fasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	267.200.000	1 laporan	325.787.824
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	paket	590.100.000	paket	637.127.136
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	paket	590.100.000	paket	637.127.136
	Program Perekonomian dan Pembangunan				1.512.199.400	100%	2.342.344.487
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Percentase Capaian Program Perekonomian Daerah	100%			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	2 laporan	474.000.000	2 laporan	652.527.683
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 laporan	243.299.950	1 laporan	331.653.046
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 laporan	230.700.050	1 laporan	320.874.637

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumberdaya alam	3 dokumen	519.099.600	3 dokumen	845.508.478
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 dokumen	191.499.850	1 dokumen	326.561.486
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	201.600.050	1 dokumen	325.119.962
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 dokumen	125.999.700	1 dokumen	194.827.030
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	3 laporan	519.099.800	3 laporan	843.308.326
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 laporan	202.499.850	1 laporan	324.895.203
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 laporan	190.600.000	1 laporan	325.715.020
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 laporan	125.999.950	1 laporan	192.698.103
			2.399.999.400		3.345.279.620

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatnya perumusan dan koordinasi, fasilitasi, emantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT PROVINSI SULAWESI TENGAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemintah Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 sd n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n				Lokasi	Catatan Pending		
				2021		2022		2023		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12		
4.	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah				3.261.846.860		2.629.612.000		2.908.938.800		2.908.938.800				
4.01	Sekretariat Daerah														
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penetapan Indikator program Biro Perelotomian yang bersifat Perelotomian yang bersifat	100%	100%	1.062.762.600	100%	758.363.050	100%	872.117.508	100%	872.117.508				
4.01.01.1.06	Administrasi Kepengawalaan Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan hasil administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	30.281.000	100%	30.261.000	100%	34.800.150	100%	34.800.150				
4.01.01.1.06.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	1 laporan	30.261.000	1 laporan	30.261.000	1 laporan	34.800.150	1 laporan	34.800.150				
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	354.168.676	1 laporan	246.342.400	1 laporan	283.293.750	1 laporan	283.293.750				
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	354.168.575	1 laporan	246.342.400	1 laporan	283.293.750	1 laporan	283.293.750				
4.01.01.1.06.08	Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket penyelesaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	paket	paket	678.333.025	paket	481.769.660	paket	654.023.698	paket	654.023.698				
4.01.01.1.06.03	Penyediakan Jasa Perlatihan dan Pelatihan Kantor	Jumlah paket penyediaan jasa perlatihan dan pelatihan kantor	paket	paket	678.333.025	paket	481.759.650	paket	554.023.598	paket	554.023.598				

Program Perkonomian dan Pembangunan	Penerapan Capaian Program Perkonomian Daerah	100%	100%	2.169.083.250	100%	1.771.148.950	100%	2.036.821.232	100%	2.036.821.232	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perkonomian	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perkonomian	2 laporan	2 laporan	638.578.850	2 laporan	493.404.675	2 laporan	567.415.375	2 laporan	567.415.375	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 laporan	1 laporan	306.777.100	1 laporan	250.777.350	1 laporan	288.393.951	1 laporan	288.393.951	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 laporan	1 laporan	391.801.750	1 laporan	242.627.325	1 laporan	279.021.424	1 laporan	279.021.424	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam	3 dokumen	3 dokumen	695.948.200	3 dokumen	640.082.025	3 dokumen	736.084.329	3 dokumen	736.084.329	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Perikanan, Kehutanan, Kelautan dan Penanaman	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perikanan, Kehutanan, Kelautan dan Penanaman	1 dokumen	1 dokumen	265.913.550	1 dokumen	246.927.400	1 dokumen	283.966.510	1 dokumen	283.966.510	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	265.661.050	1 dokumen	245.837.400	1 dokumen	282.713.010	1 dokumen	282.713.010	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 dokumen	1 dokumen	164.373.600	1 dokumen	147.317.225	1 dokumen	169.414.809	1 dokumen	169.414.809	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	3 laporan	3 laporan	794.556.200	3 laporan	637.662.250	3 laporan	733.311.688	3 laporan	733.311.688	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 laporan	1 laporan	332.961.900	1 laporan	245.867.450	1 laporan	282.517.568	1 laporan	282.517.568	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 laporan	1 laporan	283.587.000	1 laporan	246.287.350	1 laporan	283.230.453	1 laporan	283.230.453	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 laporan	1 laporan	168.007.300	1 laporan	145.707.450	1 laporan	167.563.567	1 laporan	167.563.567	

4.2 Cascading Biro Perekonomian

RPJMD REN STRA	MISI 5 : Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	
	Tujuan RPJMD	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah secara Merata dan Berkeadilan
	Indikator Tujuan	Indeks Williamson
	Sasaran RPJMD	Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan
	Indikator Sasaran	Inflasi
URUSAN		SEKRETARIAT DAERAH (BIRO PEREKONOMIAN)
REN STRA	Tujuan RENSTRA	Tercapainya peningkatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan & implementasi kebijakan perekonomian
	Indikator Tujuan/Sasaran	Percentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan Perekonomian daerah
	Sasaran RENSTRA	Meningkatnya perumusan dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perekonomian daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Indikator Program :		
1. Nilai SAKIP 2. Indeks Reformasi Birokrasi 3. Indeks Kepuasan Masyarakat		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Kegiatan : Persentase hasil administrasi kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Kegiatan : Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Kegiatan : Persentase hasil laporan administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Kegiatan : Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		

<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p>		
<p>Sub Kegiatan</p> <p>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p>		
<p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Indikator Program :</p> <p>Persentase Capaian Program Perekonomian Daerah</p>		
<p>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian</p>		
<p>Sub Kegiatan</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</p>		
<p>Sub Kegiatan</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</p>		
<p>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumberdaya alam</p>		
<p>Sub Kegiatan</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Sub Kegiatan</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan, dan Lingkungan Hidup</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</p>	<p>Sub Kegiatan</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi, dan Air</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</p>
<p>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD</p>		
<p>Sub Kegiatan</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Jumlah Laporan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan Dan Aneka Usaha</p>	<p>Sub Kegiatan</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Jumlah Laporan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi</p>	<p>Sub Kegiatan</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <p>Jumlah Laporan Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah</p>

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2023 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Biro Perekonomian Periode 2022-2023, dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023.

Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketiaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi tengah juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang kebijakan perekonomian tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

RENCANA KERJA

(RENJA)



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Palu, Mei 2022

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Drs. AWALUDIN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19660306 199801 1 011

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR _____ i

DAFTAR ISI _____ ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Tahun 2022	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	13
3.3. Program dan Kegiatan	15

BAB VI PENUTUP _____ 16

DAFTAR TABEL _____

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk memiliki dokumen perencanaan secara menyeluruh yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diwajibkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan dokumen tahunan sebagai langkah atau tindak lanjut dari Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Disamping itu, Rencana Kerja ini juga diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja berdasarkan kemampuan serta kondisi lingkungan sebagai kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023.

Program dan kegiatan yang direncanakan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui pembiayaan APBD Provinsi Tahun 2023 disusun berdasarkan suatu sistem yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*Outcome*) dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan berdasarkan pendekatan kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2023, beberapa landasan hukum yang dijadikan pedoman sebagai berikut :

1. UU nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026;
16. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu di Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyusunan program kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat pada optimalisasi pencapaian hasil (*Outcomes*).

Sementara, tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penyusunan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan capaian RENSTRA Tahun lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2022

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen rencana perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dimaksud meliputi:

1. Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan, dan
3. Hasil dari Rencana Program dan Kegiatan

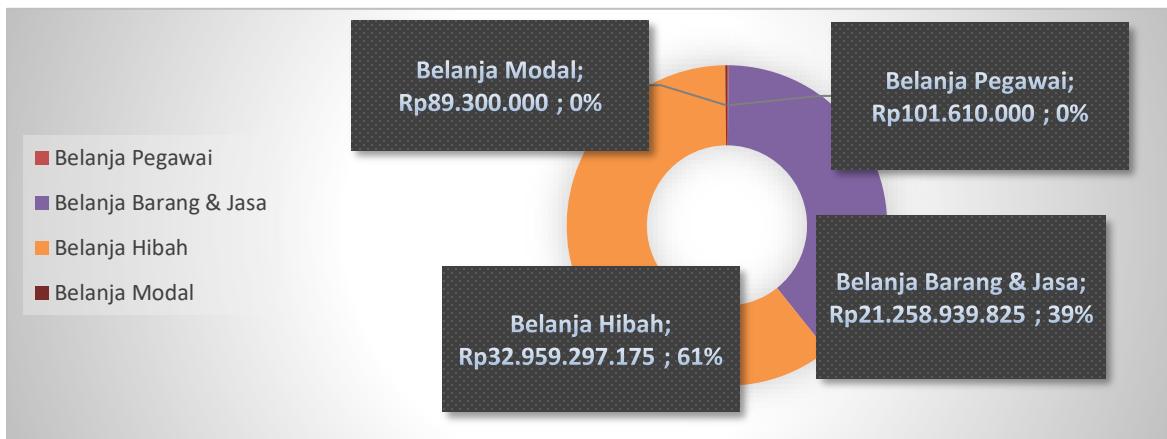
Dalam peraturan pemerintah dimaksud, diwajibkan bagi setiap daerah untuk membuat dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Selain itu, bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga diwajibkan menyusun atau membuat dokumen rencana strategis (renstra) setiap 5 tahun dan dokumen rencana kerja (renja) setiap tahun.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan penegasan sekaligus pedoman teknis penyusunan seluruh dokumen yang disebutkan di atas.

Alokasi anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp.54.409.147.000** yang semuanya terakomodir pada **Belanja Operasi** dan **Belanja Modal** dengan rincian *Belanja Pegawai* sebesar *Rp.101.610.000*, *Belanja Barang dan Jasa* sebesar *Rp.21.258.939.825*, *Belanja Hibah* sebesar *Rp.32.959.297.175* dan *Belanja Modal Peralatan dan Mesin* sebesar *Rp.89.300.000* Proporsi Anggaran **Belanja Operasi** dan **Belanja Modal** dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Proporsi Belanja



Pada gambar 2.1. di atas dapat dilihat bahwa proporsi anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah sangat proporsional. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase besarnya anggaran belanja pegawai sebesar 0,19%, belanja barang dan jasa sebesar 39%, belanja hibah sebesar 61%, sedangkan belanja modal hanya sebesar 0,16%. Namun proporsi tersebut belum cukup ideal jika dilihat berdasarkan tugas dan fungsi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersifat koordinasi dan pelayanan administratif.

Alokasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.590.716.425
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.225.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	956.850.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.532.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.489.975
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.300.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.709.450
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	242.610.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Program : Kesejahteraan Rakyat	52.818.430.575
	Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	52.010.357.000
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	419.999.525
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	388.074.050

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Tahun Lalu Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dilihat pada lampiran daftar tabel.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Tugas dan fungsi pelayanan Kesejahteraan Rakyat dijabarkan dalam program dan kegiatan. Hasil analisis pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan berpengaruh karena telah selesainya masa pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari capaian realisasi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Bulan Juni atau Triwulan II Tahun Anggaran 2022, menunjukkan bahwa realisasi anggaran adalah sebesar 41,26% atau Rp.22.448.876.863 dari Pagu Anggaran sebesar Rp.54.409.147.000.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dilihat pada lampiran daftar tabel.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinamika organisasi pemerintahan dewasa ini menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang lebih kreatif, inovatif dan adaptif. Oleh karenanya, selain dibutuhkan komitmen yang kuat dari penentu kebijakan juga

adanya motivasi seluruh aparatur untuk bekerja lebih keras dan cerdas serta disiplin tinggi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang strategis. Dalam kaitan ini maka kedudukan, peran dan fungsi setiap aparatur harus berjalan secara optimal. Untuk itu dapat dikemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan belum cukup memadai
2. Sarana dan prasarana juga masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi
3. Mekanisme dan pola kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien
4. Koordinasi dan komunikasi antara Biro Kesejahteraan Rakyat dengan dinas dan lembaga teknis lainnya belum optimal
5. Pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja belum optimal.
6. Sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) terhadap kinerja aparatur belum optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Program dan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan Nomenklatur baru yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 berjumlah 2 Program, 10 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat. Adapun hasil kajian dimaksud adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKA,DPA dan Dokumen Perencanaan lainnya, laporan capaian dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang akurat, terukur dan tepat waktu serta laporan capaian realisasi Keuangan SKPD yang akuntable dan akurat.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Non ASN berdaya guna dalam membantu pekerjaan ASN.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dalam rangka koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah, Koordinasi Perencanaan Program, Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensingkronkan antara program & kegiatan Pusat, Propinsi serta kabupaten/kota.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang milik daerah Biro untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran, jasa, keuangan serta kebutuhan rutin kantor lainnya.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah Biro untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

- Program Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan, memverifikasi, penyaluran, monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana spiritual yakni Bantuan Hibah pada Rumah Ibadah, Yayasan/Organisasi/Lembaga dan Pendidikan Keagamaan, menyelenggarakan Kebijakan Pembinaan serta pengembangan Keagamaan pada tingkat Provinsi dan tingkat Nasional seperti Penyelenggaraan Ibadah Haji, MTQ/STQ, MQK, FASI, LASQI, POSPENAS, Kemah Santri Nusantara, Safari Ramadhan, PESPRAWI (Protestan), BAMAG, PESPARANI (Katolik), Utsawa Dharma Gita, Seni Sakral (Hindu), Swayamvara Tripitaka Gatha, Yobbana Dhamma Samajja (Budha) dan Perayaan Hari Hari Besar Keagamaan serta mengkoordinasikan kebijakan kerjasama dan Lembaga Keagamaan.
 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kegiatan ini dilaksanakan untuk Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, Kebijakan dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar pada Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial.
 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kegiatan ini dilaksanakan untuk Koordinasi & Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I (Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata), Non Pelayanan Dasar II (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja) dan Non Pelayanan Dasar III (Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah “INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH - TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN”.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, perlu diimplementasikan melalui tujuh misi Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam 7 agenda prioritas nasional yaitu:

1. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
2. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

3. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.
5. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
6. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Fokus pembangunan adalah pada koridor penting di setiap pulau dan kepulauan yang dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan dalam lima tahun mendatang. Oleh karena itu, strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (leave no one behind). Fokus pembangunan adalah daerah di dekat pusat pertumbuhan yang dapat diberikan input untuk mengejar pertumbuhan dikoridor pertumbuhan terdekatnya. Identifikasi koridor pemerataan difokuskan pada daerah administratif yang dapat didorong secara cepat pertumbuhannya, dengan penyediaan infrastruktur dasar.

Dengan tujuan demikian, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada 2015-2019 dimulai dengan tahap perencanaan untuk 10 wilayah metropolitan (WM), 11 kota baru dan 11 KEK. Sampai dengan akhir 2018 tiga WM telah dalam tahap legalisasi (Surabaya, Jakarta, Bandung), dua WM dalam tahap penyusunan Rppres (Manado dan Banjar), dan satu WM dalam tahap penyusunan materi teknis (Palembang). Diharapkan dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan diluar pulau dapat mengurangi ketimpangan di seluruh wilayah, penurunan angka kemiskinan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan perencanaan strategis yang sangat penting dalam perjalanan suatu organisasi, kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru suatu otonomi daerah, oleh karena itu suatu organisasi harus mampu mengakomodir dinamika tersebut.

Mengacu pada kedudukan, peran, tugas dan fungsi maka Visi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus sejalan harus sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencerminkan asas dan tujuan penyelenggaraan tugas administratif pemerintahan pada tahun mendatang, maka visi yang ditetapkan adalah **Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Feodalisme itu menghambat kemajuan. Untuk mengikisnya di dalam tubuh kekuasaan tidak perlu terlalu banyak belajar tentang teori egalitarianisme, yang paling penting adalah berkuasalah dengan menjadikan setiap orang sebagai manusia untuk di hormati harkat dan martabatnya.

Sedangkan Misi yang di tetapkan adalah;

1. Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai Nilai Kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang merata dan berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama manusia sebagai wujud Pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan antar Daerah Bertetangga sekawan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi Bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.
9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas sektor Unggulan Daerah.

Tujuan dan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat mengacu pada masing-masing Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan);
2. Meningkatnya Konsumsi Perkapita.

Dengan Indikator Tujuan :

- a. Terwujudnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

- b. Terwujudnya Kualitas Koordinasi & Sinkronisasi Kelembagaan dalam Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
3. Dimanfaatkannya sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Dan Fasilitas Perkantoran, Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan;
2. Meningkatnya Kualitas Koordinasi & Sinkronisasi Kelembagaan Dalam Perumusan, Penetapan Dan Pelaksanaan Serta Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- b. Indeks Reformasi Birokrasi;
- c. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah;
- d. Pengeluaran Perkapita;
- e. Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan;
- f. Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan;
- g. Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pada lampiran tabel.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan kondisi yang realistik dari perencanaan kegiatan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Keseimbangan gerak pembangunan mengisyaratkan bahwa aktifitas perencanaan harus bergulir dan mengalami perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitasnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam Rencana Kerja ini, namun Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 tergantung pada sikap, mental, tekad serta semangat dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitannya maka diharapkan seluruh aparat Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan Rencana Kerja Anggaran di setiap bagian sebagai dokumen yang mengacu pada Renja Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2021-2026 sehingga pelaksanaan rencana berjalan secara sistematis dan sinergis.

Palu, Mei 2022

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Drs. AWALUDIN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19660306 199801 1 011

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPIAAN RENSTRA
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71,00	-	63,05	60,00	95%	64,50	124,50	175%
		Nilai SAKIP	86	-	51	50	98%	70	120,00	140%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	92	-	76,61	60,00	78%	80	140,00	152%
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	-	100	100	100%	100	200	200%
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	-	100	100	100%	100	200	200%
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	-	100	100	100%	100	200	200%
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	-	100	100	100%	100	200	200%
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	100	100	100%	100	200	200%

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022		
							Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
4	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	100	100	100%	100	200	200%
4	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	100	100	100%	100	200	200%
4	01	04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	18	-	3	3	100%	3	6	33%
4	01	04	1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan, Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembhaga Keagamaan	2	-	2	2	100%	2	4	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	3	-	3	3	100%	3	6	200%
4 01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	3	-	3	3	100%	3	6	200%

Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan			3%	3%	3%	3%	90%	50%	97%	98%	
2	Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan			8%	8%	8%	8%	95%	50%	97%	98%	
3	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Cataatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan													
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																				
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																				
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dimanfaatkannya Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 Indeks	1 Laporan	100 %	25,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	64 Indeks									
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Pelayanan Administrasi Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 Indeks	1 Dokumen	100 %	962,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	64 Indeks									
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
4 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Percentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 Indeks	4 Orang	100 %	48,532,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	64 Indeks									
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 Indeks	1 Laporan	100 %	255,489,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	64 Indeks									
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dimanfaatkannya Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 Indeks	12 Unit	100 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	64 Indeks									
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dimanfaatkannya Hasil Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 Indeks	1 Laporan	100 %	90,893,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	64 Indeks									
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	imanfaatkannya Hasil Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 Indeks	75 Unit	100 %	282,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	64 Indeks									
4 01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
									23,932,500,000			18,405,304,218									

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.00.00.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 4.01.00.00.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
4 01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual								23,032,500,000			16,024,804,218		
4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Hasil Fasilitasi Pengembangan Keagamaan, Pemberian bantuan sarana peribadatan serta pendidikan keagamaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 8 % 3 %	450 Unit	100 %	13,880,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	100 % 8 % 3 %	396,750,000
4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Hasil Fasilitasi Pengembangan Keagamaan, Pemberian bantuan sarana peribadatan serta pendidikan keagamaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 8 % 3 %	170 Lembaga	100 %	9,152,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	100 % 8 % 3 %	15,628,054,218
4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar								450,000,000			1,190,250,000		
4 01 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Hasil Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 8 % 3 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	100 % 8 % 3 %	396,750,000
4 01 04 1.02 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Hasil Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 8 % 3 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	100 % 8 % 3 %	396,750,000
4 01 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan	Hasil Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	100 % 8 % 3 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi	100 % 8 % 3 %	396,750,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
	Bidang Sosial	Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	dan Sosial	Semua Kelurahan						Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan			
4 01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						450,000,000			1,190,250,000				
4 01 04 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	Hasil Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 8 % 3 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	100 % 8 % 3 % 396,750,000	
4 01 04 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Hasil Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 8 % 3 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	100 % 8 % 3 % 396,750,000	
4 01 04 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Hasil Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 8 % 3 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	100 % 8 % 3 % 396,750,000	
TOTAL									25,677,500,000	20,210,561,579				

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

TAHUN 2023



DAFTAR ISI

Hal.

SAMPUL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang _____	1
1.2. Landasan Hukum _____	2
1.3. Maksud dan Tujuan _____	3
1.4. Sistematika Penulisan _____	4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun Lalu _____	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah _____	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi _____	10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 _____	12
2.5. Penelaahan Usulan Program _____	14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional _____	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja _____	17
3.3. Program dan Kegiatan _____	20

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN _____

BAB V PENUTUP _____

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan *stakeholder* atas peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pengadaan barang/jasa pada sektor publik khususnya pemerintah daerah dewasa ini semakin meningkat, utamanya terkait dengan tujuan dari teori *good governance*. Hal ini mendapat tanggapan positif daerah pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk memenuhi hal tersebut maka dibentuk Biro Pengadaan Barang/Jasa yang berfungsi untuk melayani dan menangani proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Dimana peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk memiliki dokumen perencanaan secara menyeluruh yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diwajibkan kepada OPD untuk membuat Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan dokumen tahunan sebagai terjemahan dari Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Disamping itu, Rencana Kerja ini juga diarahkan pada upaya pencapaian

target kinerja berdasarkan kemampuan serta kondisi lingkungan sebagai kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023.

Program dan kegiatan yang direncanakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui pembiayaan APBD Provinsi Tahun 2023 disusun berdasarkan suatu sistem yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*Outcome*) dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan berdasarkan pendekatan kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2023, dijabarkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 - 2033
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026
14. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.
15. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyusunan program kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa pada optimalisasi pencapaian hasil (*Outcomes*).

Sementara, tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan capaian RENSTRA
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dahulunya merupakan Bagian Layanan Pengadaan dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Biro Pengadaan Barang/Jasa terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Biro Pengadaan Barang/jasa dalam pelaksanaan Renja Tahun 2022 tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) Realisasi Anggaran
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Persentase Realisasi Anggaran	78 Indeks 90%	85,42 Indeks 96,88%	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Adm. Keuangan Perangkat Daerah c. Adm. Kepegawaian PD d. Adm. Umum PD e. Pengadaan BMD Penunjang Urusan	2.676.615.580	2.631.909.362	98,33%

No.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) Realisasi Anggaran
					Pemerintahan Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Keg. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan PBJ, LPSE dan Pembinaan Advokasi PBJ.	- Persentase Tingkat Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa	90%	97,08%	Program : Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan : a. Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa b. Pengelolaan LPSE c. Pembinaan dan Advokasi PBJ	1.455.623.385	1.371.420.744	94,21%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa tahun 2022 terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pada Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dimana dari Paket Pengadaan yang ada sejumlah 137 Paket Tender, yang di Tender sejumlah 133 Paket, dan yang Gagal Tender sejumlah 4 Paket.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam rangka pencapaian target kinerja program/kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Masih kurangnya koordinasi dengan Stakeholder dan OPD terkait, dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

b. Jumlah Personil belum memenuhi kriteria dalam hal pengelolaan pengadaan barang/jasa.

c. Belum sesuainya kompetensi pengelola pengadaan barang/jasa.

d. Belum memadainya sarana dan prasarana.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan realisasi yang telah memenuhi target, maka berdampak terhadap pencapaian program Renstra Biro Pengadaan Barang/Jasa yang tergambar dalam tujuan dan sasaran Renstra Biro Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yaitu :

Tujuan :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan).

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas lembaga pengadaan barang/jasa.

6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder dan OPD Terkait, dalam hal dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - b. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang pengelolaan pengadaan barang/jasa

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022**
Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
01 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Realisasi Anggaran	92 Indeks 90 Persen	100 %	78 Indeks 90 Persen	85,42 Indeks 96,88 Persen	110 %	78 Indeks 90 Persen	78 Indeks 90 Persen	85 % 100 %
01 1 01	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %
01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	20 %
01 1 02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %
01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
01 1 05	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %
01 1 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	20 %
01 1 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	- Orang	10 Orang	10 Orang	100 %	10 Orang	10 Orang	20 %
01 1 06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %
01 1 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	20 %
01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	18 Paket	6 Paket	6 Paket	100 %	6 Paket	6 Paket	20 %
01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	20 %
01 1 07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 %
01 1 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	94 Unit	10 Unit	10 Unit	100 %	10 Unit	10 Unit	20 %
01 1 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	- Unit	- Unit	0 %	- Unit	- Unit	0 %
01 1 08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %
01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
01 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %

01	1	09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	73 %
01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100 %	17 Unit	17 Unit	100 %
01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	100 %	43 Unit	43 Unit	100 %
01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	20 %
07	1		Prog. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan PBJ, LPSE dan Pembinaan Advokasi PBJ	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %	
07	1	01	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	20 %	
07	1	01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
07	1	01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	20 %
07	1	01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	20 %
07	1	02	Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	20 %	
07	1	02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
07	1	02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
07	1	02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	20 %
07	1	03	Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	20 %	
07	1	03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
07	1	03	01	Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	- Orang	10 Orang	10 Orang	100 %	10 Orang	10 Orang	20 %
07	1	03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Tugas dan fungsi pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan dalam program dan kegiatan. Analisis pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian realisasi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, menunjukkan bahwa realisasi anggaran adalah sebesar 96,88% atau Rp. 4.003.330.106,- dari Pagu setelah perubahan sebesar Rp. 4.132.238.965,-

Selain itu dilihat juga dari persentase tingkat penyelesaian pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Paket	Paket Sukses dilelang	Paket Gagal Lelang
1	137 Paket	133 Paket	4 Paket

Adapun Capaian Kinerja Layanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian
Percentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya & yang ditandatangani pada kuartal pertama	Percentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa Ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	6 ----- 133 x 100 % 4,51%
Percentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Percentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	133 ----- 10241 x 100 % 1,30%
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- Total belanja langsung	Rp 1.959.042.144.551 ----- Rp 2.893.767.613.481 x 100 % 67,70%
-	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n) - ----- Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1)	Rp 1.171.295.426.565 ----- Rp 845.266.121.066 - Rp 326.029.305.499

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapai beberapa isu-isu penting, antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang tersedia belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai.
2. Sarana dan prasarana juga masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi
3. OPD tergolong baru sehingga budaya dan etika organisasi yang belum kondusif, masih membutuhkan beberapa penyesuaian terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Tugas dan fungsi belum sesuai dengan beban kerja perorangan.
5. Belum adanya Standar Operasional Pelayanan mengakibatkan mekanisme dan pola kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
6. Koordinasi dan komunikasi antara bagian dalam Biro Pengadaan Barang/Jasa belum optimal.
7. Pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja belum optimal. Belum adanya kriteria khusus dalam pengembangan kompetensi dan kebutuhan pegawai terutama berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
8. Sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) terhadap kinerja aparatur belum optimal. Utamanya terkait Tambahan Penghasilan yang belum sesuai dengan beban kerja.
9. Pola pengadaan aset yang belum didasarkan pada kinerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 berjumlah 2 Program dan 10 Kegiatan.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Realisasi Anggaran	78 Indeks 90 Persen	1.545.100.000		Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Realisasi Anggaran	78 Indeks 90 Persen	3.072.769.800		
01 1 01	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	9.000.000		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.731.000		
01 1 0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.731.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	
01 1 02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100 %	460.000.000		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100 %	675.630.000		
01 1 0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	460.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	675.630.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	
01 1 05	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100 %	109.000.000		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100 %	149.476.640		
01 1 0502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	86.186.900	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	
01 1 0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	72.000.000	Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	63.289.740	Jakarta dan Daerah Lainnya	
01 1 06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100 %	206.100.000		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100 %	397.130.299		
01 1 0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	9.100.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	21.100.050	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	
01 1 0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	50.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	48.698.249	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	
01 1 0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	147.000.000	Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	327.332.000	Jakarta dan Daerah Lainnya	
01 1 07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	175.000.000		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	758.673.069		
01 1 0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	175.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	758.673.069	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	
01 1 0701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	
01 1 08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	322.000.000		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	360.897.000		
01 1 0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	77.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100.297.500	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	
01 1 0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	220.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	225.049.500	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	
01 1 0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.550.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	

01	1	09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	264.000.000		Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	724.231.792	
01	1	0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	210.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	295.648.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01	1	0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	41.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	37.530.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01	1	0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	391.053.792	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
07	1		Prog. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Percentase Pengelolaan PBJ, LPSE dan Pembinaan Advokasi PBJ	90 %	954.900.000		Percentase Pengelolaan PBJ, LPSE dan Pembinaan Advokasi PBJ	90 %	1.327.230.200	
07	1	01	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Percentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	350.000.000		Percentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	473.700.550	
07	1	0101	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	85.000.000	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	149.194.300	Prov. Sulawesi Tengah
07	1	0102	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	130.000.000	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	159.516.250	Prov. Sulawesi Tengah
07	1	0103	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	135.000.000	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	164.990.000	Prov. Sulawesi Tengah
07	1	02	Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Percentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 %	420.000.000		Percentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 %	484.928.750	
07	1	0201	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	100.000.000	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	115.511.050	Prov. Sulawesi Tengah
07	1	0202	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	200.000.000	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	249.420.000	Prov. Sulawesi Tengah
07	1	0203	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	120.000.000	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	119.997.700	Prov. Sulawesi Tengah
07	1	03	Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Percentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	184.900.000		Percentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	368.600.900	
07	1	0302	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	50.000.000	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	128.611.000	Prov. Sulawesi Tengah
07	1	0301	Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	44.900.000	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	138.270.000	Prov. Sulawesi Tengah
07	1	0303	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	90.000.000	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	101.719.900	Prov. Sulawesi Tengah
JUMLAH							2.500.000.000				4.400.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa. Adapun program dan kegiatan hasil usulan adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini dimaksudkan untuk Penyediaan Pakaian Dinas dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bagi Pegawai Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini dimaksudkan untuk Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi Peralatan dan Mesin Perkantoran.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan ini dimaksudkan untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi dan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi Biaya pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin serta, Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor.
- Program Kebijakan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, kegiatan ini dimaksud untuk Pengelolaan Strategi PBJ, Pelaksanaan PBJ serta Pemantauan dan Evaluasi PBJ.

- Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, kegiatan ini dimaksudkan untuk Pengelolaan SPSE, Pengembangan Sistem Informasi PBJ dan Pengelolaan Informasi PBJ
- Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ, kegiatan ini dimaksudkan untuk Pembinaan Kelembagaan dan SDM PBJ, serta Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis PBJ.

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tengah**

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
01 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Realisasi Anggaran	78 Indeks 90 Persen	
01 1 01	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
01 1 0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0102	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100 %	
01 1 0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0105	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100 %	
01 1 0502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jakarta dan Daerah Lainnya
01 1 0106	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100 %	
01 1 0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Jakarta dan Daerah Lainnya
01 1 0707	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
01 1 0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0808	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
01 1 0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0909	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	
01 1 0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
07 1 01	Prog. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengelolaan PBJ, LPSE dan Pembinaan Advokasi PBJ	90 %	
07 1 0101	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	
07 1 0101	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 0102	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 0103	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 0202	Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 %	
07 1 0201	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 0202	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 0203	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 0303	Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	
07 1 0302	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 0301	Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 0303	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Prov. Sulawesi Tengah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, perlu diimplementasikan melalui sembilan misi Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataaan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar .
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menyikapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dalam rangka optimalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam proses pengadaan barang/jasa, maka Pemerintah Sulawesi Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah guna pembentukan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Makna Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang dalam hal ini adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa merupakan *center of excellence* (pusat keunggulan) yang memiliki karakter strategis, kolonratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga mendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Untuk itu dengan adanya Biro Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Sulawesi Tengah bertujuan mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan perencanaan strategis yang sangat penting dalam perjalanan suatu organisasi, kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru suatu otonomi daerah, oleh karena itu suatu organisasi harus mampu mengakomodir dinamika tersebut.

Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah : "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju".

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan pada masa kini dan masa akan datang, optimis untuk mewujudkan visi, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Misi Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai tindak lanjut dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang termuat dalam Misi Ke- 2 “Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM” merupakan suatu acuan yang diharapkan dapat menjadi fokus arah tindakan dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mencapai visi, melaksanakan misi dan memecahkan permasalahan, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

Tujuan :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)”

Sasaran :

“Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa”

Tujuan dan Sasaran Biro Pengadaan Barang/Jasa dapat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa yang terdiri :

1. Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa sasarannya meliputi:
 - a. Meningkatnya inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. Meningkatnya pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa lebih terarah;
 - d. Menyiapkan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. Melakukan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - h. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sasarannya meliputi :
 - a. Melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - b. Melaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan;
 - d. Melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - e. Melakukan pengelolaan informasi kontrak;
 - f. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - g. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
3. Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa sasarannya meliputi :
 - a. Melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ, dan/atau tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

- e. Melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
4. Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sasarannya meliputi :
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.

Rencana Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 memuat program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Evaluasi	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)					
(1)	(2)	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Evaluasi	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4 01	SEKRETARIAT DARAH																
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Realisasi Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Realisasi Anggaran		78 90%	78 90%	3.072.769.800	3.072.769.800		78 90%	78 90%	3.226.408.290	3.226.408.290	Tidak Terdapat Perbedaan pada Jumlah Dana Anggaran Renja dan RKA			
4 01 01 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	6.731.000	6.731.000		100%	100%	7.067.550	7.067.550				
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	4 Laporan	4 Laporan	6.731.000	6.731.000		4 Laporan	4 Laporan	7.067.550	7.067.550			
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	Percentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik		100%	100%	675.630.000	675.630.000		100%	100%	709.411.500	709.411.500				
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	1 Dokumen	1 Dokumen	675.630.000	675.630.000		1 Dokumen	1 Dokumen	709.411.500	709.411.500			
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	Percentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik		100%	100%	149.476.640	149.476.640		100%	100%	156.950.472	156.950.472				
4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	1 Paket	1 Paket	86.186.900	86.186.900		1 Paket	1 Paket	90.496.245	90.496.245			
4 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	10 Orang	10 Orang	63.289.740	63.289.740		10 Orang	10 Orang	66.454.227	66.454.227			
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	Percentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik		100%	100%	397.130.299	397.130.299		100%	100%	416.986.814	416.986.814				
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	2 Paket	2 Paket	21.100.050	21.100.050		2 Paket	2 Paket	22.155.053	22.155.053			
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	6 Paket	6 Paket	48.698.249	48.698.249		6 Paket	6 Paket	51.133.161	51.133.161			
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta dan daerah lainnya	Jakarta dan daerah lainnya	4 Laporan	4 Laporan	327.332.000	327.332.000		4 Laporan	4 Laporan	343.698.600	343.698.600			
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	758.673.069	758.673.069		100%	100%	796.606.722	796.606.722				
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	10 Unit	10 Unit	758.673.069	758.673.069		10 Unit	10 Unit	796.606.722	796.606.722			
4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	-	-	-	-		-	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Evaluasi	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
(1)	(2)	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	(15)	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	360.897.000	360.897.000			100%	100%	378.941.850	378.941.850			
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	1 Laporan	1 Laporan	100.297.500	100.297.500			1 Laporan	1 Laporan	105.312.375	105.312.375			
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	1 Laporan	1 Laporan	225.049.500	225.049.500			1 Laporan	1 Laporan	236.301.975	236.301.975			
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	1 Laporan	1 Laporan	35.550.000	35.550.000			1 Laporan	1 Laporan	37.327.500	37.327.500			
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	724.231.792	724.231.792			100%	100%	760.443.382	760.443.382			
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	17 Unit	17 Unit	295.648.000	295.648.000			17 Unit	17 Unit	310.430.400	310.430.400			
4 01 01 1.09 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	43 Unit	43 Unit	37.530.000	37.530.000			43 Unit	43 Unit	39.406.500	39.406.500			
4 01 01 1.09 04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Biro PBJ Prov. Sulteng	Biro PBJ Prov. Sulteng	1 Paket	1 Paket	391.053.792	391.053.792			1 Paket	1 Paket	410.606.482	410.606.482			
4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Percentase Pengelolaan PBJ, LPSE dan Pembinaan Advokasi PBJ			90%	90%	1.327.230.200	1.327.230.200			90%	90%	1.393.591.710	1.393.591.710			
4 01 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Percentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			90%	90%	473.700.550	473.700.550			90%	90%	497.385.578	497.385.578			
4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulteng	Prov. Sulteng	1 Laporan	1 Laporan	149.194.300	149.194.300			1 Laporan	1 Laporan	156.654.015	156.654.015			
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulteng	Prov. Sulteng	4 Laporan	4 Laporan	159.516.250	159.516.250			4 Laporan	4 Laporan	167.492.063	167.492.063			
4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulteng	Prov. Sulteng	4 Laporan	4 Laporan	164.990.000	164.990.000			4 Laporan	4 Laporan	173.239.500	173.239.500			
4 01 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Percentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			90%	90%	484.928.750	484.928.750			90%	90%	509.175.188	509.175.188			
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Prov. Sulteng	Prov. Sulteng	1 Laporan	1 Laporan	115.511.050	115.511.050			1 Laporan	1 Laporan	121.286.603	121.286.603			
4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulteng	Prov. Sulteng	1 Laporan	1 Laporan	249.420.000	249.420.000			1 Laporan	1 Laporan	261.891.000	261.891.000			
4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulteng	Prov. Sulteng	1 Laporan	1 Laporan	119.997.700	119.997.700			1 Laporan	1 Laporan	125.997.585	125.997.585			
4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Percentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			90%	90%	368.600.900	368.600.900			90%	90%	387.030.945	387.030.945			
4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulteng	Prov. Sulteng	1 Dokumen	1 Dokumen	128.611.000	128.611.000			1 Dokumen	1 Dokumen	135.041.550	135.041.550			
4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulteng	Prov. Sulteng	10 Orang	10 Orang	138.270.000	138.270.000			10 Orang	10 Orang	145.183.500	145.183.500			
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulteng	Prov. Sulteng	1 Dokumen	1 Dokumen	101.719.900	101.719.900			1 Dokumen	1 Dokumen	106.805.895	106.805.895			
							4.400.000.000	4.400.000.000					4.620.000.000	4.620.000.000			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RKPD 2023		PENDANAAN		Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	5	6	7
01 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Presentase Realisasi Anggaran	78 Indeks 90 Persen	1.545.100.000	78 Indeks 90 Persen	3.072.769.800	
01 1 01	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	9.000.000	100 %	6.731.000	
01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	6.731.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100 %	460.000.000	100 %	675.630.000	
01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	460.000.000	1 Dokumen	675.630.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 05	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100 %	109.000.000	100 %	149.476.640	
01 1 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37.000.000	1 Paket	86.186.900	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	72.000.000	10 Orang	63.289.740	Jakarta dan Daerah Lainnya
01 1 06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100 %	206.100.000	100 %	397.130.299	
01 1 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	9.100.000	2 Paket	21.100.050	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	50.000.000	6 Paket	48.698.249	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	147.000.000	4 Laporan	327.332.000	Jakarta dan Daerah Lainnya
01 1 07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	175.000.000	100 %	758.673.069	
01 1 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	175.000.000	10 Unit	758.673.069	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	322.000.000	100 %	360.897.000	
01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	77.000.000	1 Laporan	100.297.500	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	225.049.500	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	35.550.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RKPD 2023		PENDANAAN		Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	5	6	7
01 1 09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	264.000.000	100 %	724.231.792	
01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	210.000.000	17 Unit	295.648.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	41.000.000	43 Unit	37.530.000	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
01 1 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.000.000	1 Unit	391.053.792	Biro PBJ Setda Prov. Sulteng
07 1	Prog. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Level kematangan/ maturasi Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	1 Level (Lvl 3)	954.900.000	1 Level (Lvl 3)	1.327.230.200	
07 1 01	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Percentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	350.000.000	90 %	473.700.550	
07 1 01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	149.194.300	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	130.000.000	4 Laporan	159.516.250	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	135.000.000	4 Laporan	164.990.000	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 02	Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Percentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 %	420.000.000	90 %	484.928.750	
07 1 02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	115.511.050	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	249.420.000	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	119.997.700	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 03	Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Percentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	184.900.000	90 %	368.600.900	
07 1 03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	44.900.000	1 Dokumen	138.270.000	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 03 01	Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	50.000.000	10 Orang	128.611.000	Prov. Sulawesi Tengah
07 1 03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	101.719.900	Prov. Sulawesi Tengah
	JUMLAH			2.500.000.000		4.400.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan kondisi yang realistik dari perencanaan kegiatan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023.

Adanya Biro Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Sulawesi Tengah ini diharapkan proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitasnya. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam Rencana Kerja ini, namun Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 tergantung pada sikap, mental, tekad serta semangat dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitannya maka diharapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Renja Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2021-2026 sehingga pelaksanaan rencana berjalan secara sistematis dan sinergis.

Palu, 02 Mei 2023

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



MUCHAMAD SAIFUDDIN PAKAYA, SE.,M.Si
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NTP. 19680506 199603 1 003



**BIRO ORGANISASI
SETDA PROV SULAWESI
TENGAH**

**“RENJA”
RENCANA KERJA
TAHUN 2023**



**Pemerintah Prov Sul-Teng
Sekretariat Daerah
Jl. Dr. Sam Ratulangi No 101
Palu Kode Pos 94111**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) dan berdasarkan Pasal 147 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD berpedoman pada arah kebijakan dan isu strategis, serta mengacu kepada RPJMD untuk keselarasan program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta dengan memperhatikan rancangan RPJMD 2021-2025 Provinsi Sulawesi Tengah.

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 1 tahun ke depan, di samping itu, Renja berfungsi pula sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dengan dukungan penuh dari semua ASN Biro Organisasi Mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Jabatan Pelaksana, diharapkan Renja ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung tercapainya Indicator Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu,

KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULTENG



ANDI KAMAL LEMBAH, SH, M.SI

Pembina Utama Muda
Nip.19670327 198903 1 009

PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2021- 2024 Biro Organisasi sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Biro Organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Biro Organisasi ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Organisasi ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2021-2026 Biro Organisasi. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Biro Organisasi.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

tajam dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2023 menentukan target yang realistik. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulteng :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287)
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 1213);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tanggal tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 Biro Organisasi ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2023 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2023 ini Biro Organisasi akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber – sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Biro Organisasi dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, memuat Program program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

I. PENDAHULUAN

Memuat Latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD, Analisa kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review tehadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja PD beserta anggaran sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BIRO ORGANISASI TAHUN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Organisasi.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Organisasi Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023, serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2022 sehingga dapat teridentifikasi, Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan sampai sejauh mana Biro Organisasi melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Ringkasan Jumlah Anggaran belanja Biro Organisasi pada Tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tengah

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Sakip, Indek RB Indeks IKM	100 persen	1.110.076.825	1.103.989.350	100%
	4.01.01.1.01	Perencanaan, enggaran dan evaluasi Kinerja erangkat Daerah	Terlaksannya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD Yang tepat	8 Dok	71.471.800	71.453.825	100%

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Waktu				
	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPRA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan	8 Dok	71.472.025	71.453.825	100%
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	301.092.000	300.939.000	100%
	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 orang	301.092.000	300.939.500	100%
	4.01.01.1.05	Adminitrasii Kepergawainan Perangkat Daerah	Terlaksannya administrasi kepegawaian PD	100 Persen	40.000.000	40.000.000	100%
	4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	8 lembar	40.000.000	40.000.000	100%
	4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13 orang	0	0	0
	4.01.01.1.06	Adminitrasii Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	468.726.350	462.935.840	100%
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan keuangan	5 paket	49.660.150	49.656.150	100%
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	5 Paket	30.000.200	30.000.200	100%
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	389.066.000	383.279.490	99%

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.01.1.08	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	1 unit	0	0	
	4.01.01.1.08	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	0	0	
	4.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	23.676.150	23.676.150	100%
	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	23.676.150	23.676.150	100%
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	52 Unit	191.330.000	190.204.035	99%
	4.01.01.1.09.01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 Unit	154.380.000	153.254.035	100%
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	36.950.000	36.950.000	100%
	4.01.02	PENATAAN ORGANISASI	Persentase Penataan Organisasi	100 Persen	3.124.653.200	2.987.443.111	100%
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksannya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 Persen	1.644.051.625	1.582.915.355	100%

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	1 Dok	448.499.650	435.838.030	97%
	4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	13 Dok	264.999.650	244.148.695	92%
	4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dok Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan	188 Dok	930.552.325	902.928.630	97%
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksannya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1 Dok	1.480.601.575	1.404.527.756	100%
	4.01.02.1.02.01		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		329.101.600	317.364.230	95%
	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja	2 Dok	168.500.000	165.504.240	98%
	4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	47/ 13 PD&Ka b/Kota	168.000.000	154.326.200	92%
	4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan tata laksana Pemerintahan	47/ 13 PD&Ka b/Kota	514.999.800	489.682.036	100%
	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	47/ 13 PD&Ka b/Kota	300.000.000	277.651.050	93%
Jumlah					4.220.949.725	4.076.652.461	97%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Organisasi.

Commented [U1]: nj

Commented [U2R1]:

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

Khusus untuk Biro Organisasi sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Biro Biro Organisasi menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Biro Organisasi serta Norma dan standar pelayanan Biro Organisasi lainnya yang berkaitan. Berikut tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng :

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					3.474.645.967	4.220.949.725	3.699.889.000		3.238.586.173	4.076.652.461	3.699.889.000		
	Terlaksanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				1.432.043.106	1.111.076.825	1.330.453.158		1.395.338.803	1.103.989.350	1.330.453.158		
	Terlaksannya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD Yang tepat Waktu				52.884.050	71.472.025	83.930.050		30.000.000	71.453.825	83.930.050		
	Tersedianyadokumen laporan capaian kinerja dan Laopran Keuangan				52.884.050	71.472.025	83.272.000		52.855.050	71.453.825	83.272.000		
	Terlaksanya Administrasi keuangan Perangkat Daerah				392.280.000	301.092.000	385.272.000		381.600.000	300939.500	385.272.000		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				392.280.000	301.092.000	385.272.000		381.600.000	300.939.500	385.272.000		
	Terlaksanya administrasi kepegawaian PD				8.000.000	40.000.000	62.809.018		8.000.000	40.000.000	62.809.018		
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta beserta perlengkapannya				8.000.000	40.0000.000	27.225.018		8.000.000	40.000.000	27.225.018		
	Terlaksannya pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				0	0	35.584.000		0	0	35.584.000		
	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah				692.085.931	468.726.350	556.582.040		668.043.456	462.935.840	556.582.040		
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				318.663.956	49.660.150	162.978.940		314.245.756	49.656.150	162.978.940		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan				44.001.800	30.000.200	29.999.950		43.999.925	30.000.200	29.999.950		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				329.420.175	389.066.000	363.873.150		309.797.775	383.279.490	363.873.150		

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Terlaksannya Pengadaan Barang Milik Daerah				21.000.000	0	0	0	20.654.000	0	0	0	
	Tersedianya kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.0000.000	0	0	0	20.654.000	0	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang				46.313.125	23.676.150	35.400.050		46.313.125	23.676.150	35.400.050		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				26.313.475	23.676.150		35.400.050	26.313.475	23.676.150	35.400.050		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.999.650				19.999.650				
	Terlaksannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				219.480.000	191.330.000	206.190.000		217.873.172	190.204.035	206.190.000		
	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				178.000.0000	154.380.000	164.160.000		176.393.172	153.254.035	164.160.000		
	Terpeliharanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.480.000	36.950.000	42.030.000		41.480.000	36.950.000	42.030.000		
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)				2.042.602.861	3.124.253.200	2.369.415.050		1.843.247.370	2.987.443.111	2.369.415.050		
	Indeks Kematangan Organisasi												
	Indeks Reformasi Birokrasi												
	Persentase Penataan Jabatan ASN sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah												
	Terlaksannya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1.103.076.475	1.644.051.625	1.164.415.550		986.294.075	1.582.915.355	1.164.415.550		
	Terlaksananya Fasilitasi												

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2020 (thn n-2)	2021 (thn n-1)	2022 (thn n)	2023 (thn n+1)	2020 Thn n-2	2021 Thn n-1	2022 Thn n	2023 Thn n+1		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
	Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				264.729.950	448.499.650	326.874.250		239.599.850	435.838.030	326.874.250		
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				162.177.375	264.999.650	171.664.550		147.450.475	244.148.695	171.664.550		
	Terlaksananya Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan				676.167.150	930.552.325	665.876.750		599.243.750	902.928.630	665.876.750		
	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				939.526.386	1.480.601.400	1.204.999.500		856.953.295	1.404.527.756	1.204.999.500		
	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				217.479.525	329.101.775	249.999.750		200.263.900	317.364.230	249.999.750		
	Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				183.229.825	168.500.000	370.000.000		179.053.825	165.504.240	370.000.000		
	Terlaksannya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				100.054.586	168.000.000	160.000.000		97.720.850	154.326.200	160.000.000		
	Terlaksananya Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				118.783.225	514.999.800	125.000.000		109.794.325	489.682.036	125.000.000		
	Terlaksannya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				319.979.225	300.000.000	299.999.750		270.120.395	277.651.050	299.999.750		

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi Setda.
Prov. Sulteng**

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan reformasi birokrasi, analisa dan kompetensi jabatan, kinerja dan pelayanan Publik.

Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional di bidang Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- c. pemantuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, Analisa dan Kompetensi Jabatan, Kinerja dan Pelayanan Publik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang brkaitan dengan tugasnya.

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

Untuk menjalankan fungsinya dibantu oleh bagian yaitu :

1. Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, supervisi, bimbingan teknis, memfasilitasi, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, memfasilitasi, melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Analisa, Formasi Jabatan, evaluasi jabatan dan kompetensi jabatan, tata usaha.
3. Bagian Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik mempunyai tugas penyiapan bahan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi, melaksanakan supervise, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana , Budaya Kerja, dan Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan tugas masih terdapat permasalahan – permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi.		
Tingkat kematangan Organisasi Masih Rendah;	Evaluasi penyelenggaran dan penataan kelembagaan perangkat daerah belum berjalan semestinya, sebab data dukung sebagai alat verifikasi kurang tersedia di beberapa OPD	kurangnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Kelembagaan
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Perangkat Daerah masih rendah		Tumpang tindih regulasi antar Kementerian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah
Belum terlaksannya evaluasi Permenpan 20 tahun 2018	Perangkat daerah belum memahami intrumen evaluasi Permenpan 20 tahun 2018	Belum adanya Sosialisasi
Belum terlaksannya evaluasi Permendagri 99 tahun 2019	Masih menunggu hasil evaluasi Perangkat daerah	Laporan hasil harus disampaikan ke Kemenpan dan Kemendagri

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

Implementasi Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh perangkat daerah, melainkan masih fokus pada pelaksanaan kegiatan di setiap kelompok kerja Tim Reformasi Birokrasi.	Komitmen Pimpinan utamanya Kepala Daerah dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Sehingga program yang dibuat lebih menyasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan mindset ASN.	- Politisasi dan Kooptasi Birokrasi, adanya hal ini menciptakan birokrasi yang tidak professional, kinerja rendah dan tidak netral dalam penyelenggaraan pemerintahan
Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan		
Penyusunan kamus kompetensi teknis belum optimal disetiap perangkat daerah	Tingkat pemahaman yang kurang dari masing-masing pejabat disetiap tugas fungsinya	Kurang efektif dan efisien penyusunan evaluasi jabatan secara manual
Perlunya adanya sistem aplikasi dalam penyusunan evaluasi jabatan yang berbasis online		Kurang efektifnya dan efisien penyusunan evaluasi jabatan secara manual
Belum maksimalnya penerapan hasil anjab dan ABK dilingkungan Pemerintah Prov. Sulteng		Belum tersampaikannya hasil sosialisasi/bimtek tentang Anjab dan ABK kepada kepala perangkat daerah dilingkup Pemprop Sulteng yang menyebabkan penenpatan pegawai belum sesuai dengan hasil Anjab dan ABK yang telah disusun dan telah ditetapkan penetapan SDM Aparatur dilingkup Pemprop sulteng masih menganut pola yang lama dalam artian belum memaksimalkan hasil Anjab dan ABK sebagai dasar penataan SDM aparatur sehingga perlu adanya perubahan mindset.
Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik		
Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah belum seluruh baik	Laporan kinerja belum memberikan analisis yang memadai dalam pencapaian kinerja	
Masih rendahnya komitmen pejabat dan seluruh PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel	Belum merata pemahaman pejabat dan seluruh PNS terkait akuntabilitas kinerja di masing-masing perangkat daerah	
Belum terimpunnya Dokumen Probis Perangkat Daerah	Operator yang menangani PROBIS Perangkat daerah tidak bekerja dengan optimal	Pejabat yang menangani PROBIS perangkat daerah di mutase ke Perangkat daerah lain
Belum tersususnya SOP Perangkat Daerah	Masih menunggu penyusunan PROBIS Perangkat Daerah	Blum diprogramkan penyusunan SOP Perangkat Daerah Menunggu PROBIS Perangkat Daerah
Belum terlaksannya pelaksanaan Budaya Kerja BERAKHLAK	Pelaksanaan Sosialisasi belum berjalan	Belum keluarkan regulasi terkait Budaya Kerja
Tatalaksana Dinas dan pakaian Dinas belum terlaksana	Adanya SE MENDAGRI terkait penundaan pakaian dinas	PERMENDAGRI tentang pakaian dinas dan tata NAskah dinas dalam Proses Revisi
(Penyusunan Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah, melaksanakan survey kepuasaan		

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

masyarakat (SKM), pelaksanaan lapor SP4N belum maksimal)		
Penetapan penerapan standar pelayanan di perangkat daerah belum dilaksanakan sesuai yang termaktup dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020	terbatasnya pemahaman Pejabat Struktural dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan, SKM dan SP4N Lapor.	kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah terhadap penyusunan dokumen standar pelayanan, SKM dan SP4N Lapor
sebagai besar Perangkat Daerah belum melaksanakan Survey Kepuasaan Masyarakat		
Belum terintegrasinya kesemua perangkat daerah		

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng Tahun 2022

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		- Indeks IKM Biro - Indeks RB Biro - Laporan Kinerja Biro	100%	840.295.675		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		- Indeks IKM Biro - Indeks RB Biro - Laporan Kinerja Biro	100%	840.295.675
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Laporan Perencanaan, pengagaran dan evaluasi biro yang disusun tepat waktudan evaluasi	100%	30.000.000		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Laporan Perencanaan, pengagaran dan evaluasi biro yang disusun tepat waktudan evaluasi	100%	30.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan	8 Dok	30.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan	8 Dok	30.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	291.192.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	291.192.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 Orang	291.192.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 Orang	291.192.000

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah	100%	39.505.000		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Persentase pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	39.505.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappanya	Palu	Jumlah paket Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapan	55 Lembar	27.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappanya	Palu	Jumlah paket Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapan	55 Lembar	27.500.000
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Palu	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13 Orang	12.005.000		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Palu	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13 Orang	12.005.000
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	279.622.525		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	279.622.525
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	49.660.150		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	49.660.150
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	5 Paket	30.000.200		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	5 Paket	30.000.200
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	199.962.175		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianaya barang milik daerah	100%	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianaya barang milik daerah	100%	0
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		0		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		0
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	23.676.150		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan dokumen penyediaan jasa	100%	23.676.150
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	23.676.150		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	23.676.150	12 Laporan	176.246.625
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Kendaraan Dinas dan Pelaporan	100%	176.300.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Kendaraan Dinas dan Pelaporan	100%	176.300.000
	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	22 Unit	139.350.000		Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	22 Unit	139.350.000

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	36.950.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	palu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	36.950.000
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase Perangkat daerah dengan nilai IKM Katagori Baik Persentase Perangkat daerah yang efektif dan Efisien Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Perjanjian Kinerja dan LKJIP Baik Persentase PD yang telah Menetapkan Tatalaksana Pemerintahan Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dengan nilai baik Persentase PD yang telah Menyusun Anjab, ABK, Evjab dan SKJ	100% 100% 100% 100% 100% 100%	2.380.654.200		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Perangkat daerah dengan nilai IKM Katagori Baik Persentase Perangkat daerah yang efektif dan Efisien Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Perjanjian Kinerja dan LKJIP Baik Persentase PD yang telah Menetapkan Tatalaksana Pemerintahan Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang telah Menyusun Anjab, ABK, Evjab dan SKJ	100% 100% 100% 100% 100% 100%	2.380.654.200
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dan Pegendalian Penetaan Kelembagaan	100%	1.279.052.225		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dan Pegendalian Penetaan Kelembagaan	100%	1.279.052.225

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			persentase Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, Evaluasi jabatan dan Standar kompetensi Jabatan	100%					persentase Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, Evaluasi jabatan dan Standar kompetensi Jabatan	100%	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi	1 Dok	348.499.750		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Dokumen Hasil penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi	100%	348.499.750
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	13 Dok	264.999.875		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Dokumen hasil Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	100%	264.999.875
	Penataan Analisis Jabatan	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan	188 Dok	665.552.600		Penataan Analisis Jabatan	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Dokumen Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan	100%	665.552.600
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Percentase PD yang di Fasilitasi dalam Pelakasanaan Reformasi Birokrasi	100%	1.101.601.975		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Fasilitasi Percentase PD yang dalam dalam Pelakasanaan Reformasi Birokrasi	100%	1.101.601.975
			Percentase Perangkat daerah yang telah menyusun Perjanjian Kinerja dan LKJIP	148.50 0.000					Percentase Perangkat daerah yang telah menyusun Perjanjian Kinerja dan LKJIP	100%	

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pusat, Prov, Kab/ Kota	Persentase PD yang telah menerapakan Budaya Kerja ASN BERAKHLAK	118.00 0.000	100%	135.102.025	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Percentase PD yang telah menerapakan Budaya Kerja ASN BERAKHLAK	100%	100%	135.102.025
			Persentase PD yang telah Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan						Persentase PD yang telah Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan		
			Persentase PD yang telah Melaksanakan Survey Kepuasaan Masyarakat (IKM)						Persentase PD yang telah Melaksanakan Survey Kepuasaan Masyarakat (IKM)		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dok						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dok	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Pusat, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja	2 Dok	148.500.000		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja	2 Dok	148.500.000
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pusat, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	47/13 PD&Kab /Kota	118.000.000		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pusat, Prov,K ab/Ko ta a	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	47/13 PD&Kab /Kota	118.000.000

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lok asi	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Loka si	Indiktor Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan tata laksana Pemerintahan	47/13 PD&Kab /Kota	500.000.000		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan tata laksana Pemerintahan	47/13 PD&Kab /Kota	500.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Pusa t, Prov, Kab/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	47/13 PD&Ka b/Kota	199.999.950		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Pusat, Prov,K ab/Ko ta	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	47/13 PD&Ka b/Kota	199.999.950

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulteng. tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Organisasi

Sesui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sesui VISI Gubernur Sulawesi Tengah “**GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU**” Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Misi 2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Ham bertujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and clean Government) dan Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan, Kesehatan berbasis informasi yang integritas dan dijalankan secara sistimatis dan digital bertujuan Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perpustakaan

Adapun Sasaran Strategis terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan dan Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima pada Program Biro Organisasi dalam Rencana Aksi yang merupakan Sasaran Strategis dalam Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah diturunkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Sasaran tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Terwujudnya Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan :

- a. Persentase laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang disusun tepat waktu.
- b. Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Persentase tersedianya barang milik daerah
- f. Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

- g. Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
- h. Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien
- i. Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat daerah dengan Nilai Baik
- j. Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas perjanjian kinerja dan laporan kinerja instansi pemerintah baik
- k. Persentase PD yang telah menetapkan tatalaksana Pemerintahan
- l. Persentase daerah yang telah menetapkan indeks kepuasaan masyarakat (IKM) kategori baik.
- m. Persentase PD yang telah menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan.
- n. Persentase PD Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pegendalian kelembagaan.
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi dalam pentaan dan Pegendalian Penataan Kelembagaan.
- p. Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dan dilakukan pembinaan penyusunan anjab, ABK, Evjab dan SKJ.
- q. Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- r. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun perjanjian kinerja dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- s. Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Budaya Kerja ASN BERAKHLAK.
- t. Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Tatalaksana Pemerintahan.
- u. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Survey kepuasaan Masyarakat (SKM)

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

Tujuan dan sasaran Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
1. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	80	85	88,50	90	92
		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	25	30	40	50	55
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Terwujudnya Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,50	66,50	68,50	70	71
		Persentase Penataan Jabatan ASN Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100

3.2 Program dan Kegiatan

Berdasarkan RKPD Biro Organisasi Setda prov. Sulteng Tahun 2023 Telah Tersusun 2 (dua) Program yang terjabarkan dalam 8 (Delapan) Kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
				4	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

		4	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				7	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, , Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
				11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Program Penataan Organisasi	8	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
				13	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kot
				14	Penataan Analisis Jabatan
		9	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	15	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
				16	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
				17	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
				18	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
				19	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting		
				2021		2022		2023		2024					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12		
Total			3.474.645.967		3.474.645.967		4.220.949.850		3.699.889.000		4.220.949.725				
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Sakip, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks IKM	1.432.043.106	80,60, 76,61 Indeks	1.432.043.10 6	80,60, 76,61 Indeks	1.111.076.825	80,60, 76,61 Indeks	1.330.453.158	80,60 .76,6 1	1.096.296.525				
4.01.01.1.01	Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Laporan Perencanaan, pengembangan dan evaluasi biro yang disusun tepat waktu	52.884.050	100 Persen	52.884.050	100 Persen	71.472.025	100 Persen	83.930.050	100 Persen	71.472.025	Palu			
4.01.01.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, RKT, Lapkin dan Reformasi Birokrasi dan laporan keuangan	52.884.050	8 Dokumen	52.884.050	8 Dokumen	71.472.025	8 Dokumen	83.930.050	8 Dokumen	71.472.025	Palu			
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	392.280.000	100 Persen	392.280.000	100 Persen	301.092.000	100 Persen	385.272.000	100 Persen	301.092.000	Palu			
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	392.280.000	13 orang	392.280.000	13 orang	301.092.000	13 orang	385.272.000	13 orang	301.092.000	Palu			
4.01.01.1.05	Adminitrasii Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi keoegawaian perangkat daerah kelengkapannya	8.000.000	100 Persen	8.000.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	62.809.018	100 Persen	39.505.000	Palu			

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting		
				2021		2022		2023		2024					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12		
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapannya	8.000.000	10 Lemb ar	8.000.000	55 Lemb ar	40.000.000	55 Lemb ar	27.225.018	55 Lemb ar	40.000.000	Palu			
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0		0	5 Org	0	5 Org	35.584.000	5 Org	0	Palu			
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	692.085.931	100 Persen	692.085.931	100 Persen	468.726.350	100 Persen	556.852.040	100 Persen	468.726.350	Palu			
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	318.663.956	5 Paket	318.663.956	5 Paket	49.660.150	5 Paket	162.978.940	5 Paket	49.660.150	Palu			
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	44.001.800	5 Paket	44.001.800	5 Paket	30.000.200	5 Paket	29.999.950	5 Paket	30.000.200	Palu			
4.01.01.1.07	Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.420.175	13 Lap	329.420.175	13 Lap	389.066.025	13 Lap	363.873.150	13 Lap	389.066.025				
4.01.01.1.07.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya barang milik daerah	21.000.000	100 Persen	21.000.000	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	Palu			
4.01.01.1.06.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	21.000.000	2 Unit	21.000.000	2 Unit	0	2 Unit		2 Unit		Palu			

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting		
				2021		2022		2023		2024					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12		
4.01.01.1.08.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	26.313.125	100 Persen	26.313.125	100 Persen	23.676.150	100 Persen	35.400.050	100 Persen	23.676.150	Palu			
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Lap	26.313.475	12 Lap	23.676.150	12 Lap	35.400.050	12 Lap	23.676.150				
	Sub Kegiatan Penyedian Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan	5 Paket	5 paket	19.999.650										
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kendaraan Dinas dan Pelaporan	219.480.000	5 Unit	219.480.000	5 Unit	191.330.000	5 Unit	206.190.000	5 Unit	191.330.000				
4.01.01.1.09.01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	178.000.000	22 Unit	178.000.000	22 Unit	154.380.000	22 Unit	164.160.000	22 Unit	154.380.000	Palu			
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41.480.000	30 Unit	41.480.000	30 Unit	36.950.000	30 Unit	42.030.000	30 Unit	36.950.000				
4.01.02	PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat daerah dengan nilai IKM Katagori Baik	1.339.339.250	100 Persen	2.042.602.861	100 Persen	3.124.653.200	100 Persen	2.369.415.050	100 Persen	3.124.653.200	Kab/Kota			

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting		
				2021		2022		2023		2024					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12		
		Persentase Perangkat daerah yang efektif dan Efisien		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen					
		Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas Perjanjian Kinerja dan LKJP Baik		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen					
		Persentase PD yang telah Menetapkan Tatalaksana Pemerintahan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen					
		Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dengan nilai baik		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen					
		Persentase PD yang telah telah menyusun Anjab, ABK, Evjab DAN SKJ		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen					
4.01.01. 1.13.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase PD Provinsi, Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dan Pengendalian Penetaan Kelembagaan	1.103.076.475	100 Persen	1.103.076.475	100 Persen	1.644.051.625	100 Persen	1.164.415.550	100 Persen	1.644.051.625	Pusat Prov. Kab/ Kota			
		persentase Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, Evaluasi jabatan dan Standar kompetensi Jabatan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100					
4.01.02. 1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi	264.729.950	1 Dok	264.729.950	1 Dok	448.499.650	1 Dok	326.874.250	1 Dok	448.499.650	Pusat Prov. Kab/ Kota			

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting		
				2021		2022		2023		2024					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12		
4.01.02. 1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	187.785.000	13 Dok	162.177.375	13 Dok	264.999.675	13 Dok	171.664.550	13 Dok	264.999.675	Pusat Prov. Kab/ Kota			
4.01.02. 1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan	676.169.150	188 Dok	676.169.150	188 Dok	930.552.300	188 Dok	665.897.750	188 Dok	930.552.300	Pusat Prov. Kab/ Kota			
4.01.02. 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase PD yang di Fasilitasi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	939.526.386	100 Persen	939.526.386	100 Persen	1.480.601.575	100 Persen	1.204.999.500	100 Persen	1.480.601.575	Pusat Prov. Kab/ Kota			
		Persentase Perangkat daerah yang telah menyusun laporan kinerja													
		Persentase PD yang telah menerapkan Budaya Kerja ASN BERAKHLAK													
		Persentase PD yang telah Menerapkan Tatalksana Pemerintahan													
		Persentase PD yang telah Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)													
4.01.02. 1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	217.479.525	1 Dok	217.479.525	1 Dok	329.101.600	1 Dok	249.999.750	1 Dok	329.101.600	Pusat Prov. Kab/ Kota			

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-1 s/d n-2)						Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting		
				2021		2022		2023		2024					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12		
4.01.02. 1.02.01	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja	183.229.825	2 Dok	183.229.825	2 Dok	168.500.000	2 Dok	370.000.000	2 Dok	168.500.000	Pusat Prov. Kab/ Kota			
4.01.02. 1.02.01	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	100.054.586	47/13 PD, Kab/ kota	100.054.586	47/13 PD, Kab/ kota	168.000.000	47/13 PD, Kab/ kota	160.000.000	47/13 PD, Kab/ kota	168.000.000	Pusat Prov. Kab/ Kota			
4.01.02. 1.02.01	Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan tata laksana Pemerintahan	118.783.225	47/13 PD, Kab/ kota	118.783.225	47/13 PD, Kab/ kota	514.999.800	47/13 PD, Kab/ kota	125.000.000	47/13 PD, Kab/ kota	514.999.800	Pusat Prov. Kab/ Kota			
4.01.02. 1.02.01	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	319.979.225	47/13 PD, Kab/ kota	319.979.225	47/13 PD, Kab/ kota	300.000.000	47/13 PD, Kab/ kota	299.999.750	47/13 PD, Kab/ kota	300.000.000	Pusat Prov. Kab/ Kota			

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2023 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Biro Organisasi Periode 2021-2026, dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Ada Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dan Penyerdaerhaan Birokrasi , perlu segera dilaksanakan:
 - a. Pengevaluasian perangkat daerah apakah perangkat daerah yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Penyusunan perubahahan uraian tugas jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Hal ini penting untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, ukuran dan sinergi.
 - c. Penyusunan dokumen evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan hal ini penting penentuan klas jabatan dan besaran TPP dan penempatan jabatan dan formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi.
 - d. Review/penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
 - e. Pelaksanaan budaya Kerja, Tatalaksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - f. Penyusunan Peta Proses Bisnis (PROBIS) Sulawesi Tengah
2. Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

yang telah dicapai perlu secara konsisten dilakukan penyusunan dokumen laporan kinerja dan perjanjian kinerja Provinsi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik (FKP, SP, SKM, SIPP dan SP4N LAPOR) perlu ditingkatkan. namun hasil yang dicapai belum dilakukan secara menyeluruh, untuk itu perlu dilaksanakan suatu kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tahun 2022 serta pelaksanaan peningkatan kinerja UKPP dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai perwujudan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan kompetensi penyelenggaraan pelayanan sesuai Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.
4. Manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik dan professional secara berkelanjutan. Penyusunan Road Map tentang reformasi birokrasi merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan bagi seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai obyek dan subyek reformasi birokrasi itu sendiri, dan hal ini merupakan perkuatan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen Pimpinan utamanya Kepala Daerah dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Sehingga program yang dibuat lebih mendasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan mindset ASN

Rencana Kerja Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan kondisi yang realistik dari perencanaan kegiatan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

RENJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 tergantung pada sikap, mental, tekad serta semangat dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitannya maka diharapkan seluruh aparat Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan Rencana Kerja Anggaran di setiap Biro sebagai dokumen yang mengacu pada Renja Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2021-2026 sehingga pelaksanaan rencana berjalan secara sistematis dan sinergis.

Demikian Rencana Kerja Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 ini diajukan untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Palu, Desember 2022

Kepala Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



ANDI KAMAL LEMBA, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19670327 198903 1 009



RENJA TAHUN 2023



BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

SETDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrakhiim, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2023, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya di bidang Administrasi dan Pimpinan untuk Tahun 2023.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang positif serta kritik yang konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, bagi kita semua khususnya bagi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Wassalamu'alaikum wr,wb

Palu, 2023
Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos

Pembina Tingkat I
Nip.19720405 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	38
BAB V PENUTUP.....	44

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Biro Administrasi Pimpinan ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2021-2026 Administrasi Pimpinan sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Administrasi Pimpinan ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Stratgeis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Administrasi Pimpinan ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2021-2026 Biro Administrasi Pimpinan. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Biro Administrasi Pimpinan.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023 menentukan target yang realistik. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287)
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

- 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2013
- 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 Biro Administrasi Pimpinan ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2023 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2023 ini Biro Administrasi Pimpinan akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber – sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Biro Administrasi Pimpinan dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, memuat Program program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Biro Administrasi Pimpinan yang memuat Latar belakang , Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Biro Administrasi Pimpinan, Analisa kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review tehadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan.

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja OPD beserta anggaran sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

V. PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN TAHUN TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Biro Administrasi Pimpinan.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023, serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2022 sehingga dapat teridentifikasi, Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2022 kami perkirakan bahwa pelaksanaan sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada umumnya realisasi program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Ringkasan Jumlah Anggaran belanja Biro Administrasi Pimpinan pada Tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra Biro administrasi Pimpinan s/d Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Tengah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Administrasi Pimpinan	2.967.204.378	0	4.031.287.550	4.016.070.475	100%	7.566.346.335	11.582.416.810	390%
		Indeks Reformasi Birokrasi Biro								
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro								
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.645.158	0	73.192.275	73.190.275	100%	53.902.050	127.092.325	97%
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	131.645.158	0	73.192.275	73.190.275	100%	53.902.050	127.092.325	97%
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	405.720.000	0	515.580.000	515.246.000	100%	831.840.000	1.347.086.000	332%
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405.720.000	0	515.580.000	515.246.000	100%	831.840.000	1.347.086.000	332%
4.01.01.1.05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241.119.546	0	147.941.325	147.590.250	100%	515.284.450	662.874.700	275%
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.750.000	0	25.000.000	25.000.000	100%	25.000.000	50.000.000	174%

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.05.03	Pendaatan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	212.369.546	0	122.941.325	122.590.250	100%	490.284.450	612.874.700	289%
4.01.01.1.06	Adminitrasii Umum Perangkat Daerah	Percentase Adminitrasii Umum Perangkat Daerah	370.449.500	0	586.690.150	583.867.000	100%	488.523.465	1.072.390.465	289%
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	82.225.000	0	120.060.150	117.237.000	98%	130.401.640	247.638.640	301%
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	288.224.500	0	466.630.000	466.630.000	100%	358.121.825	824.751.825	286%
4.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.683.619	0	168.654.550	168.356.300	100%	219.182.975	387.539.275	191%
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	202.683.619	0	168.654.550	168.356.300	100%	219.182.975	387.539.275	191%
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	363.802.500	0	351.520.000	350.444.674	100%	585.200.000	935.644.674	257%
4.01.01.1.09.01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	363.802.500	0	351.520.000	350.444.674	100%	585.200.000	935.644.674	257%

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraa Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Percentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	459.999.856	0	1.339.339.250	1.329.637.750	99%	4.046.315.395	5.375.953.145	1169%
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	114.597.644	0	106.542.000	105.802.700	99%	217.793.325	323.596.025	282%
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	229.999.713	0	1.045.012.250	1.042.561.750	100%	3.269.056.900	4.311.618.650	1875%
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	115.402.500	0	187.785.000	181.273.300	97%	559.465.170	740.738.470	642%
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Percentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten	791.784.200	0	848.370.000	847.738.226	100%	826.098.000	1.673.836.226	211%
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	229.494.000	0	260.690.000	260.600.000	100%	333.200.000	593.800.000	259%
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	332.166.000	0	288.840.000	288.335.426	100%	328.029.000	616.364.426	186%
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	230.124.200	0	298.840.000	298.802.800	100%	164.869.000	463.671.800	201%
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Percentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	197.709.150	0	224.016.450	222.984.650	100%	644.254.425	867.239.075	439%
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	197.709.150	0	224.016.450	222.984.650	100%	644.254.425	867.239.075	439%
		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	197.709.150	0	224.016.450	222.984.650	100%	644.254.425	867.239.075	439%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Didalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng yaitu membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan supervisi, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- Penggunaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi keprotokolan, fasilitasi perjalanan dinas, pelayanan tamu pemerintah daerah dan pimpinan, komunikasi pimpinan, penyusunan materi sambutan/paparan/pengarahan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- Pengelolaan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi keprotokolan, fasilitasi perjalanan dinas dan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan;
- Pendampingan pelaksanaan keprotokolan Pemerintah Daerah, Fasilitasi perjalanan dinas dan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan;
- Pengurusan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, pemantauan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perkalan dinas Gubernur dan wakil Gubernur;
- Penghimpunan dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- Penjadwalan, pencatatan, monitoring, pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan acara Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Pengumpulan, pengolahan, pengembangan, penyajian dan penyampaian dokumen, konten dan komunikasi Gubernur dan wakil Gubernur;
- Pengorganisasian dan penyusunan dokumen Rencana Strategis, RKA, DPA dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Penyusunan dan pengelolaan dokumen kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Penyelenggaraan administrasi di Biro Administrasi Pimpinan;
- Pengolahan kepegawaian di Biro Administrasi Pimpinan;
- Pengolahan keuangan di Biro Administrasi Pimpinan;
- Pengolahan barang/asset di Biro Administrasi Pimpinan;
- Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro Administrasi Pimpinan; Setda Prov. Sulteng.

Rincian tugas Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng, meliputi :

- Memimpin dan mengkoordinasikan pekaksanan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng.
- Melaksanakan koordinasi, Kerjasama dan kemitraan dengan jajaran Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng;
- Melaksanakan pendistribusian tugas ke Bagian pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng;
- Melaksanakan bimbingan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja satuan pelaksana dan jajaran sumber daya manusia Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng;

- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Adminitrasi Pimpinan Seta Prov. Suleng.

Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng terdiri dari 3 (tiga) Bagian :

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda;
2. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
3. Bagian Protokol.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan supervisi, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, tata usaha. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Pengordinasian penyusunan dokumen RENSTRA, RKA, DPA dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng;
- Pengumpulan bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng;
- Pelaksanaan pengedalian dan evaluasi implementasi RENSTRA dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng;
- Fasilitasi evaluasi RENSTRA, RKA, DPA dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng;
- Melakukan pengusulan perencanaan kepegawaian dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara lingkup Sekretariat Daerah;
- Melakukan pengusulan penempatan, pengangkatan, mutasi dan kepangkatan Aparatur Sipil Negara lingkup Sekretariat Daerah;
- Melakukan penegakan disiplin serta pengusulan pemberian penghargaan Aparatur Sipil Negara lingkup Sekretariat Daerah;
- Melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan nominatif dan daftar urut kepangkatan serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;

- Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPER, Kartu Suami/Isteri, SKP dan urusan pelayanan KORPRI lingkup Sekretariat Daerah;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan di bidang kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;
- Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan di Biro Administrasi Pimpinan;
- Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan karsipan di Biro Administrasi Pimpinan;
- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan ANJAB, SOP, RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD di Biro Administrasi Pimpinan;
- Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di Biro Administrasi Pimpinan;
- Melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Biro Administrasi Pimpinan;
- Melaksanakan perencanaan pemeliharaan kendaraan dan perlengkapan di Biro Administrasi Pimpinan;
- Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Biro Administrasi Pimpinan;
- Melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Biro Administrasi Pimpinan.

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan. Dalam menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan dengan Perangkat Daerah terkait;
- Menghimpun bahan dan data serta melakukan analisa dalam rangka penyusunan materi rapat pimpinan;
- Menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
- Menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
- Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi serta penyusunan dokumentasi dan pelaporan;
- Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- Memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
- Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan;
- Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi sekretariat pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan dengan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait;
- Menghimpun bahan dan data serta melakukan analisa dalam rangka penyusunan naskah dan dokumentasi pemerintah;

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang acara, tamu, dan keprotokolan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Protokol mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan keperluan yang berkaitan dengan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara, mengatur ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat dinas serta resepsi Pimpinan;
- Menyiapkan bahan koordinasi persiapan dan gladi lapangan dalam acara kenegaraan/acara resmi;
- Menyiapkan bahan laporan pimpinan serta buku panduan acara upacara baik secara kenegaraan maupun resmi;
- Menyiapkan koordinasi gladi lapangan, dan mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam acara resmi dan acara kenegaraan;
- Menyiapkan koordinasi para ajudan Pimpinan Pemerintah Provinsi;
- Mendokumentasikan acara kegiatan Pimpinan Pemerintah Provinsi;
- Menyiapkan tanda kenang-kenangan (souvenir);
- Melaksanakan supervisi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi Pengaturan Acara;
- Menyusun bahan kebijakan umum Pengaturan Acara, Tata Upacara/Tata Tempat;
- Melaksanakan pengelolaan kebijakan umum pelayanan tamu;
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan tamu;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan tamu;
- Menyiapkan bahan koordinasi persiapan penerimaan, akomodasi dan transportasi kunjungan bagi tamu VIP, VVIP dan tamu lainnya;
- Menyiapkan bahan rencana agenda kunjungan tamu dan perjalanan dinas pimpinan;
- Menyiapkan bahan pelaporan kegiatan tamu VIP, VVIP dan tamu lainnya;
- Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait kegiatan keprotokolan;
- Menyusun bahan kebijakan umum hubungan keprotokolan;
- Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan keprotokolan;

Khusus untuk Biro Administrasi Pimpinan sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Biro Administrasi Pimpinan menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pimpinan serta Norma dan standar pelayanan Biro Administrasi Pimpinan lainnya yang berkaitan. Berikut tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng :

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan
Setda Prov. Sulteng

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai SAKIP Biro Administrasi Pimpinan			4,031,287,550	2,580,177,720	2,967,204,378	3,412,285,035	4,016,070,475	7,566,346,335	2,967,204,378	3,412,285,035	
	Indeks Reformasi Birokrasi Biro											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro											
	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73,192,275	114,474,050	131,645,158	151,391,931	73,190,275	53,902,050	131,645,158	151,391,931	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			73,192,275	114,474,050	131,645,158	151,391,931	73,190,275	53,902,050	131,645,158	151,391,931	
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			515,580,000	352,800,000	405,720,000	466,578,000	515,246,000	831,840,000	405,720,000	466,578,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi			515,580,000	352,800,000	405,720,000	466,578,000	515,246,000	831,840,000	405,720,000	466,578,000	

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021 (thn n-2)	2022 (thn n-1)	2023 (thn n)	2024 (thn n+1)	2021 Thn n-2	2022 Thn n-1	2023 Thn n	2024 Thn n+1	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Tugas ASN												
Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				147,941,325	209,669,170	241,119,546	277,287,477	147,590,250	515,284,450	241,119,546	277,287,477	
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				25,000,000	25,000,000	28,750,000	33,062,500	25,000,000	25,000,000	28,750,000	33,062,500	
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				122,941,325	184,669,170	212,369,546	244,224,977	122,590,250	490,284,450	212,369,546	244,224,977	
Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah				586,690,150	322,130,000	370,449,500	426,016,925	583,867,000	488,523,465	370,449,500	426,016,925	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				120,060,150	71,500,000	82,225,000	94,558,750	117,237,000	130,401,640	82,225,000	94,558,750	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				466,630,000	250,630,000	288,224,500	331,458,175	466,630,000	358,121,825	288,224,500	331,458,175	
Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				168,654,550	176,246,625	202,683,619	233,086,162	168,356,300	219,182,975	202,683,619	233,086,162	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				168,654,550	176,246,625	202,683,619	233,086,162	168,356,300	219,182,975	202,683,619	233,086,162	
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				351.520.00	316,350,000	363,802,500	418,372,875	350,444,674	585,200,000	363,802,500	418,372,875	

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021 (thn n-2)	2022 (thn n-1)	2023 (thn n)	2024 (thn n+1)	2021 Thn n-2	2022 Thn n-1	2023 Thn n	2024 Thn n+1	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			351,520,000	316,350,000	363,802,500	418,372,875	350,444,674	585,200,000	363,802,500	418,372,875	
	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan			1,339,339,250	399,999,875	459,999,856	528,999,835	1,329,637,750	4,046,315,395	459,999,856	528,999,835	
	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan			106,542,000	99,650,125	114,597,644	131,787,290	105,802,700	217,793,325	114,597,644	131,787,290	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1,045,012,250	199,999,750	229,999,713	264,499,669	1,042,561,750	3,269,056,900	229,999,713	264,499,669	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			187,785,000	100,350,000	115,402,500	132,712,875	181,273,300	559,465,170	115,402,500	132,712,875	
	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten			848,370,000	688,508,000	791,784,200	910,551,830	847,738,226	826,098,000	791,784,200	910,551,830	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			260,690,000	199,560,000	229,494,000	263,918,100	260,600,000	333,200,000	229,494,000	263,918,100	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			288,840,000	288,840,000	332,166,000	381,990,900	288,335,426	328,029,000	332,166,000	381,990,900	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			298,840,000	200,108,000	230,124,200	264,642,830	298,802,800	164,869,000	230,124,200	264,642,830	
	Persentase Kebijakan Administrasi Pembanguna			224,016,450	171,921,000	197,709,150	227,365,523	222,984,650	644,254,425	197,709,150	227,365,523	

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021 (thn n-2)	2022 (thn n-1)	2023 (thn n)	2024 (thn n+1)	2021 Thn n-2	2022 Thn n-1	2023 Thn n	2024 Thn n+1	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			224,016,450	171,921,000	197,709,150	227,365,523	222,984,650	644,254,425	197,709,150	227,365,523	
	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah			224,016,450	171,921,000	197,709,150	227,365,523	222,984,650	644,254,425	197,709,150	227,365,523	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda. Prov. Sulteng

Optimalisasi Fungsi Fasilitasi Dan Koordinasi Biro Administrasi Pimpinan yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas khususnya kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta fungsi Sekretariat Daerah merupakan pusat pengendalian pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Selain memberikan pelayanan kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnya juga memberikan pelayanan kepada pemerintah kabupaten/kota berupa fasilitasi administrasi dibidang produk hukum, organisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan termasuk didalamnya kerjasama pembangunan daerah.

Oleh karena tugas pokoknya menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kedinasan serta kegiatan – kegiatan KDH/WKDH kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, maka seyogyanya melakukan sinkronisasi koordinasi, berintegrasi dan bersinergi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima, dalam arti pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pimpinan tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada Masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, yakni Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, masih terdapat permasalahan – permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kinerja pelaksanaan tugas bidang protokol, Perencanaan dan kepegawaian, serta Materi dan Komunikasi Pimpinan.	kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas dan fungsi biro	sarana dan prasarana kerja kurang memadai
Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang tugas fungsi pelayanan terhadap KDH/WKDH	Sarana mobilitas lapangan untuk tugas pelayanan kunjungan kerja KDH/WKDH serta peralatan peliputan untuk dokumentasi masih kurang memadai	Kondisi Kendaraan Operasional dan peralatan peliputan sudah tidak memenuhi standar pelayanan terhadap KDH/WKDH

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng Tahun 2022

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indiktor Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Biro Administrasi Pimpinan	74 Nilai	2.967.204.378	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Biro Administrasi Pimpinan	74 Nilai	2.967.204.378
			Indeks Reformasi Birokrasi Biro	64 Indeks				Indeks Reformasi Birokrasi Biro	64 Indeks	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	80 Indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	80 Indeks	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	131.645.158	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	131.645.158
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	131.645.158	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	131.645.158
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	405.720.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	405.720.000

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	405.720.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	405.720.000
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	241.119.546	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	241.119.546
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	28.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	28.750.000
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Palu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	212.369.546	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Palu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	212.369.546
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	370.449.500	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	370.449.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	82.225.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	82.225.000

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	288.224.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	288.224.500
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Percentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	202.683.619	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Percentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	202.683.619
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	202.683.619	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	202.683.619
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palu	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	363.802.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palu	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	363.802.500
	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	363.802.500	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	363.802.500

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kab/ Kota	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	100 Persen	459.999.856	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kab/ Kota	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	100 Persen	459.999.856
	Penyiapan Materi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	96 Dokumen (Bahan Materi)	114.597.644	Penyiapan Materi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	96 Dokumen (Bahan Materi)	114.597.644
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/ rillis)	229.999.713	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/ rillis)	229.999.713
	Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	792 Laporan (kali)	115.402.500	Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	792 Laporan (kali)	115.402.500
	Fasilitasi Keprotokolan	Kab/ Kota	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten	100 Persen	791.784.200	Fasilitasi Keprotokolan	Kab/ Kota	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten	100 Persen	791.784.200
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	720 Laporan (kali)	229.494.000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	720 Laporan (kali)	229.494.000

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Laporan (kali)	332.166.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Laporan (kali)	332.166.000
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	840 Laporan (kali)	230.124.200	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kab /Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	840 Laporan (kali)	230.124.200
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persen	197.709.150	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persen	197.709.150
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	197.709.150	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	197.709.150
			Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen				Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	197.709.150	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	197.709.150

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng. tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan
3. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Ketatalaksanaan
4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
5. Peningkatan Akuntabilitas
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi
7. Pengendalian Pembangunan
8. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
9. Peningkatan Kualitas Kinerja BUMD
10. Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi

Memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dapat dikemukakan bahwa secara umum keterkaitannya dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari tugas dan fungsi untuk mewujudkan :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pembinaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- c. Perumusan dan penyusunan kebijakan daerah serta pembinaan di bidang perekonomian, pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan;
- d. Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- f. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pembinaan di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- g. Pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- i. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Administrasi Pimpinan

Dalam rangka mencapai visi, melaksanakan misi dan memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Sasarannya adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.
 - b. Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang terlihat dari peningkatan kinerja dan disiplin aparatur.
 - c. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.
 - d. Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah.
 - e. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
 - f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi. Sasarannya adalah:
 - a. Menurunnya angka kemiskinan.
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
- 3) Meningkatkan dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwah serta peningkatan sarana dan prasarana. Sasarannya adalah meningkatnya kerukunan hidup dan harmonisasi umat beragama.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Meningkatnya Layanan Keprotokolan, Materi Dan Komunikasi Pimpinan Serta Perencanaan Dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	Persen	100	100	100	100	100
	tingkat kepuasan terhadap materi dan dokumentasi pimpinan	Persen	100	100	100	100	100	
	Persentase kualitas layanan kepegawaian lingkup sekretariat daerah	Persen	100	100	100	100	100	
	Tingkat kualitas penyusunan dokumen perencanaan lingkup sekretariat daerah	Persen	100	100	100	100	100	

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan RKPD Biro Administrasi Pimpinan Setda prov. Sulteng Tahun 2022 Telah Tersusun 2 (dua) Program yang terjabarkan dalam 9 (sembilan) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Biro Administrasi Pimpinan**

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				4	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
		4	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		5	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		7	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	9	Penyiapan Materi Pimpinan
				10	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
				11	Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan
		8	Fasilitasi Keprotokolan	12	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
				13	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
				14	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	9	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	15	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tabel. 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Tengah

Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Administrasi Pimpinan		74 Nilai	8,890,607,752	APDB		80 Nilai	10,224,198,915
		Indeks Reformasi Birokrasi Biro		64 Indeks				66 Indeks	
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro		80 Indeks				88.5 Indeks 0	
4.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	100 Persen	21,778,850	APDB		100 Persen	25,045,678
4.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	3 Dokumen	21,778,850	APDB		3 Dokumen	25,045,678
4.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	100 Persen	1,004,130,000	APDB		100 Persen	1,154,749,00
4.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	1 Dokumen	1,004,130,000	APDB		1 Dokumen	1,154,749,500

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	100 Persen	296,259,440	APDB		100 Persen	340,698,356
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palu	10 Paket	111,140,440	APDB		10 Paket	127,811,506
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palu	10 Dokumen	185,119,000	APDB		10 Dokumen	212,886,850
4.01.01.1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	100 Persen	655,264,831	APDB		100 Persen	753,554,556
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Palu	6 Paket	66,930,531	APDB		7 Paket	76,970,111
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Palu	1 Paket	588,334,300	APDB		1 Paket	676,584,445
4.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	100 Persen	203,092,950	APDB		100 Persen	233,556,893
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palu	1 Dokumen	203,092,950	APDB		1 Dokumen	233,556,893

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	Palu	100 Persen	354,960,000	APDB		100 Persen	408,204,000
4.01.01.1.09.01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palu	5 Unit	354,960,000	APDB		5 Unit	408,204,000
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	Kab/ Kota	100 Persen	5,430,269,871	APDB		100 Persen	6,244,810,352
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Kab/ Kota	96 Dokumen (Bahan Materi)	280,164,500	APDB		96 Dokumen (Bahan Materi)	322,189,175
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab/ Kota	630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/illis)	4,578,776,200	APDB		630 Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/illis)	5,265,592,630
4.01.01.1.13.03	Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Kab/ Kota	792 Laporan (kali)	571,329,171	APDB		792 Laporan (kali)	657,028,547
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten	Kab/ Kota	100 Persen	924,851,810	APDB		100 Persen	1,063,579,582

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1. 14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kab/ Kota	720 Laporan (kali)	82,260,000	APDB		720 Laporan (kali)	94,599,000
4.01.01.1. 14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab/ Kota	72 Laporan (kali)	118,682,000	APDB		72 Laporan (kali)	136,484,300
4.01.01.1. 14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kab/ Kota	840 Laporan (kali)	723,909,810	APDB		840 Laporan (kali)	832,496,282
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan		100 Persen	1,069,692,000	APDB		100 Persen	1,230,145,800
4.01.08.1. 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	100 Persen	1,069,692,000	APDB		100 Persen	1,230,145,800
		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen				100 Persen	
4.01.08.1. 02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Palu	1 Laporan	1,069,692,000	APDB		1 Laporan	1,230,145,800
					9,960,299,752				11,454,344,715

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan adalah Optimalisasi pelaksanaan pelayanan pimpinan dan protokol dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting		
				2021		2022		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	7	8	7	8	9	10	11	12		
4.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Administrasi Pimpinan	4,031,287,550	62	Nilai	4,031,287,550	70	Nilai	7,566,346,335	74	Nilai	8,890,607,752	
		Indeks Reformasi Birokrasi Biro		60	Indeks		62	Indeks		64	Indeks		
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro		76.6	Indeks		78	Indeks		80	Indeks		
		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	Persen		100	Persen		100	Persen		
4.01.0 1.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73,192,275	100	Persen	73,192,275	100	Persen	53,902,050	100	Persen	21,778,850	
4.01.0 1.1.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73,192,275	3	Dokumen	73,192,275	3	Dokumen	53,902,050	3	Dokumen	21,778,850	
4.01.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	515,580,000	100	Persen	515,580,000	100	Persen	831,840,000	100	Persen	1,004,130,000	

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Pening		
				2021		2022		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	7	8	7	8	9	10	11	12		
4.01.0 1.1.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	515,580,000	1 Dokumen	515,580,000	1 Dokumen	831,840,000	1 Dokumen	1,004,130,000	Palu			
4.01.0 1.1.05	Admininitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Admininitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147,941,325	100 Persen	147,941,325	100 Persen	515,284,450	100 Persen	296,259,440	Palu			
4.01.0 1.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	25,000,000	10 Paket	25,000,000	10 Paket	25,000,000	10 Paket	111,140,440	Palu			
4.01.0 1.1.05 .03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	122,941,325	10 Dokumen	122,941,325	10 Dokumen	490,284,450	10 Dokumen	185,119,000	Palu			
4.01.0 1.1.06	Admininitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Admininitrasi Umum Perangkat Daerah	586,690,150	100 Persen	586,690,150	100 Persen	488,523,465	100 Persen	655,264,831	Palu			
4.01.0 1.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	120,060,150	4 Paket	120,060,150	5 Paket	130,401,640	6 Paket	66,930,531	Palu			

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Pening		
				2021		2022		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	7	8	7	8	9	10	11	12		
		Kantor yang Disediakan											
4.01.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	466,630,000	1 Paket	466,630,000	1 Paket	358,121,825	1 Paket	588,334,300	Palu			
4.01.0 1.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168,654,550	100 Persen	168,654,550	100 Persen	219,182,975	100 Persen	203,092,950	Palu			
4.01.0 1.1.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	168,654,550	1 Laporan	168,654,550	1 Dokumen	219,182,975	1 Dokumen	203,092,950	Palu			
4.01.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	351,520,000	100 Persen	351,520,000	100 Persen	585,200,000	100 Persen	354,960,000	Palu			

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)					Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting	
				2021		2022		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	7	8	7	8	9	10	11	12		
4.01.0 1.1.09 .01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	351,520,000	5 Unit	351,520,000	5 Unit	585,200,000	5 Unit	354,960,000	Palu			
4.01.0 1.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan	1,339,339,250	100 Persen	1,339,339,250	100 Persen	4,046,315,395	100 Persen	5,430,269,871	Kab/ Kota			
4.01.0 1.1.13 .01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	106,542,000	96 Dokumen (Bahan Materi)	106,542,000	96 Dokumen (Bahan Materi)	217,793,325	96 Dokumen (Bahan Materi)	280,164,500	Kab/ Kota			
4.01.0 1.1.13 .02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,045,012,250	1362 Laporan (630 Naskah Sambutan , 12 Juru Bicara, 720 Informasi/ rillis)	1,045,012,250	1362 Laporan (630 Naskah Sambutan , 12 Juru Bicara, 720 Informasi/ rillis)	3,269,056,900	1362 Laporan (630Nask ah Sambutan , 12 Juru Bicara, 720 Informasi/ rillis)	4,578,776,200	Kab/ Kota			
4.01.0 1.1.13 .03	Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	187,785,000	792 Laporan (kali)	187,785,000	792 Laporan (kali)	559,465,170	792 Laporan (kali)	571,329,171	Kab/ Kota			

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)					Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting	
				2021		2022		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	7	8	7	8	9	10	11	12		
4.01.0 1.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten	848,370,000	100 Persen	848,370,000	100 Persen	826,098,000	100 Persen	924,851,810	Kab/ Kota			
4.01.0 1.1.14 .01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	260,690,000	720 Laporan (kali)	260,690,000	720 Laporan (kali)	333,200,000	720 Laporan (kali)	82,260,000	Kab/ Kota			
4.01.0 1.1.14 .02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	288,840,000	72 Laporan (kali)	288,840,000	72 Laporan (kali)	328,029,000	72 Laporan (kali)	118,682,000	Kab/ Kota			
4.01.0 1.1.14 .03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	298,840,000	840 Laporan (kali)	298,840,000	840 Laporan (kali)	164,869,000	840 Laporan (kali)	723,909,810	Kab/ Kota			
4.01.0 8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan	224,016,450	100 Persen	224,016,450	100 Persen	644,254,425	100 Persen	1,069,692,000				
4.01.0 8.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	224,016,450	100 Persen	224,016,450	100 Persen	644,254,425	100 Persen	1,069,692,000	Palu			

RENJA TAHUN 2023 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

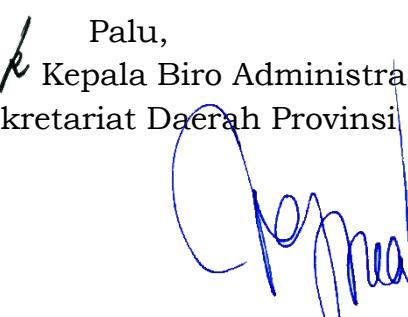
KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Pening		
				2021		2022		2023					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	7	8	7	8	9	10	11	12		
		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen		100 Persen		100 Persen					
4.01.0 8.1.02 .02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	224,016,450	1 Laporan	224,016,450	1 Laporan	644,254,425	1 Laporan	1,069,692,000	Palu			

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Biro Administrasi Pimpinan Periode 2021-2023, dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Prov. Sulteng, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023.

Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketiaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi tengah juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang Pengelolaan informasi dan Pelayanan Pimpinan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

Palu, 2023
Kepala Biro Administrasi Pimpinan 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Pembina Tingkat I
Nip.19720405 200012 1 001